

30-03-00  
LPU

## LAPORAN PENELITIAN

### TRANSFORMASI NILAI NILAI PANCASILA (HAM) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA



Perpustakaan UAJY



0500022551

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ATMA JAYA  
YOGYAKARTA

DITERIMA : 30 MAR 2000

INVENTARISASI

030/FH/H403LP/00

KLASIFIKASI

R-f-323 / Pen / t

SELESAI/PROSES

10 APR 2000

Oleh :

**ST. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum.**

**Konsultan :**

**Drs. Paulinus Soge, SH. MS.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**



PERPUSTAKAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM PUSTAKA

- A. Sekilas Pemahaman tentang Manusia
- B. Pengertian Hak Asasi Manusia
- C. Pangkal Tolak Munculnya Hak Asasi Manusia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Faktula Perumusan Pancasila
- B. Penjabaran Nilai Nilai Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila
- C. Kajian Nilai Nilai Pancasila dan Transformasi-nya dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
- D. Transformasi Nilai Nilai Pancasila dalam Beberapa Hukum Positif di Indonesia

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran Saran

DAFTAR PUSTAKA

# LAPORAN PENELITIAN

## TRANSFORMASI NILAI NILAI PANCASILA (HAM) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Telah diseminarkan di Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tanggal 25 Maret 2000

Peneliti

ST. Harum Pudjiarto RS, SH., M Hum

Mengetahui

Dekan Fak. Hukum UAJY



Dr. B. Obin Sindudisastra, SH., M Hum)

Konsultan

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Paulinus Soge.

( Drs. Paulinus Soge, SH., MS)

Mengetahui :



Ch. Evi Utami . M., Ph.D.

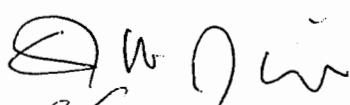
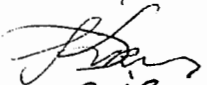

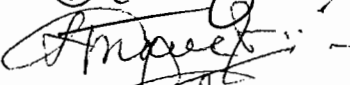
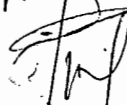
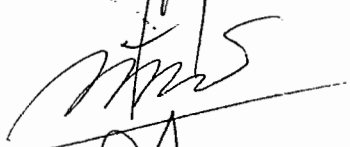

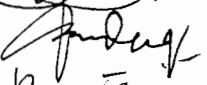


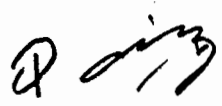
Kepala LPU UAJY

# DAFTAR HADIR SEMINAR LAPORAN PENELITIAN

## "TRANSFORMASI NILAI NILAI PANCASILA (HAM) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA"

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Hari, tanggal : Jumat 25 Pebruari 2000  
Pukul : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang I/19  
Peneliti : ST. Harum Pudjiarto RS, SH., M Hum  
Konsultan : Drs. Paulinus Soge, SH., MS

No.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Y. Hantono. SH. MH.	
2.	D. Krisnantoro SH. M Hum	
3.	Imma Indra Dwi W, SH	
4.	Simon Sora	
5.	Sti Pudyatnoko	
6.	J.B Daliyo	
7.	W. Dwaro Tjandra	
8.	Caritas Woro	
9.	B. Bambang Rianto	
10.	Juni Rahwidi	
		Konsultan,
		
		Drs. Paulinus Soge, SH.,

## PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Paulinus Soge, SH. MS.  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Sekretaris LPU  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Status : Tenaga Pengajar Fakultas Hukum UAJY

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa karya penelitian dari :

Nama : St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum.  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : Lektor Madya / III C  
Jabatan : -  
Status : Tenaga Pengajar Fakultas Hukum UAJY  
Judul Penelitian : Transformasi Nilai Nilai Pancasila (HAM) dalam  
Hukum Positif di Indonesia.

Dapat dinilai :

a. Sistematika : Baik / Cukup / ~~Sedang~~  
b. Isi / materi : Baik / Cukup / ~~Sedang~~  
c. Kesimpulan : Baik / Cukup / ~~Sedang~~  
d. Daftar Pustaka : Ada dan dipergunakan

Karena karya penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan kelengkapan untuk pengusulan jabatan akademik.

Yogyakarta, 28 Pebruari 2000  
Penilai,



Drs. Paulinus Soge, SH. MS.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan.**

Sejak peristiwa Dili Timor Timur 12 Nopember 1991 yang lalu, negara Indonesia dituduh telah menginjak-injak Hak Asasi Manusia bangsanya. Nampaknya tuduhan itu tidak berhenti di situ, melainkan justru berlangsung hingga sampai saat ini tahun 1999 sebagai era reformasi.

Di era reformasi, berbagai macam tuntutan pada negara dikemukakan secara terbuka baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, yang pada akhirnya bermuara pada masalah Hak Asasi Manusia dan Hukum. Era reformasi ini nampaknya membawa keberuntungan bagi negara Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia siap memasuki dunia globalisasi di Tahun 2003 nanti, karena mau tidak mau negara Indonesia harus ikut globalisasi.

Inti dari globalisasi adalah bukanlah sekedar aktifitas seseorang atau suatu negara di pelbagai negara, tetapi ada suatu cara baru (new way) yang menonjol yakni usaha untuk mencari keseimbangan antara kualitas kinerja global dengan berbagai kebutuhan lokal, dengan mematahkan apa yang dinamakan kualitas sumber daya manusia yang handal (genius) tanpa melihat nasionalitas yang bersangkutan, adanya standar-standar buku internasional yang berlaku dimanapun orang berada, didukung dengan sistem informasi yang global yang canggih (Daniel, 1993, XXIV dalam Muladi, Makalah tt : 3)

Dari pernyataan di atas globalisasi tidak hanya melanda sektor kehidupan ekonomi saja, melainkan melanda seluruh sektor kehidupan manusia baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Indikator kinerja nasional dapat berupa cita-cita nasional (ideologi, konstitusi) yang akan diuji peranannya sebagai ideologi yang terbuka, demikian pula fleksibilitas Undang-Undang Dasar/konstitusi, di samping itu dapat berupa kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa sebagai karakter masyarakat yang pluralistik. Sedangkan indikator global, meliputi adanya standar-standar baku internasional, resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi, konvensi-konvensi internasional dan lain sebagainya serta kualitas sumber daya yang handal.

Proses globalisasi, akan mempertemukan keua indikator, baik indikator nasional maupun indikator global dalam satu kesatuan dunia. Oleh karena tidak ada lagi batas-batas wilayah suatu negara, tidak ada lagi jarak antara negara yang satu dengan negara yang lain, tidak lagi ada budaya-budaya etnosentrik, semuanya merupakan satu kesatuan yang universal. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan perubahan sosial yang sistematis dalam bentuk program nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam berbagai sektor kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebaliknya bila tidak dipersiapkan secara sistematis, maka perubahan sosial dapat mengakibatkan disorganisasi sosial dan personal dalam suatu negara, maka "cultur lag" dalam globalisasi akan menempatkan suatu bangsa/negara terbuang/terlempar dari pergaulan internasional (transnational disorganize).

Perencanaan sosial yang mantap dan sistematis perlu dipersiapkan dengan melakukan gerakan-gerakan pembaharuan (reform movement) untuk melakukan koreksi hal-hal yang kurang pas di dalam masyarakat, tanpa harus menghilangkan identitas nasional, dengan mendayagunakan performance indicator baik nasional maupun indicator global (Druker, 1995:95 dalam Muladi, makalah, tt:4).

Globalisasi nampaknya menghendaki diadopsinya instrumen-instrumen internasional (indikator global). Di dalam kondisi yang semacam ini dapat menimbulkan pendapat berbeda. Di satu sisi adaptasi/adopsi terhadap nilai-nilai internasional dianggap sebagai pemberdayaan (empowering) terhadap ideologi bangsa. Oleh karena itu nilai-nilai internasional dianggap sebagai sub sistem dari nilai-nilai nasional. Semua ini mengakibatkan proses adaptasi/ratifikasi menjadi lancar. Di sisi yang lain nilai-nilai internasional tidak dianggap sebagai sub sistem nilai-nilai nasional, oleh karena itu proses adaptasi/ratifikasi sulit atau terkesan terlambat.

Demikian juga masalah sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia dan hukum di Indonesia sebagai bagian dari globalisasi politik. Globalisasi di bidang politik antara lain meliputi masalah issue lingkungan hidup, transparansi/keterbukaan, demokratisasi dan hak asasi manusia, berkaitan dengan issue hak asasi manusia.

Sejarah munculnya pemikiran Hak Asasi Manusia dan perkembangannya di Indonesia, mendasarkan pada pandangan patrikularistik relatif, yakni pandangan suatu negara terhadap Hak Asasi Manusia dengan menitik beratkan pada nilai-nilai sosial budaya/profil sosial budaya/kinerja-kinerja nasional, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai universal manusia/nilai-nilai internasional/kinerja-kinerja global, dalam arti nilai-nilai internasional diratifikasi untuk dapat diselaraskan dengan nilai-nilai nasional. Dengan perkataan lain nilai-nilai internasional dianggap sebagai suatu sub sistem hukum nasional.

Penegasan tersebut diperlukan untuk memberikan kerangka landasan bagi operasionalisasi restriksi dan limitasi terhadap hak asasi manusia yang dimungkinkan oleh instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang sekaligus memberikan gambaran keseimbangan, keserasian, keselarasan antara hak dan kewajiban.

Dalam buku ini, penulis ingin mengupas secara sekilas kaitan hak asasi manusia dengan hukum positif di Indonesia dalam kerangka menyongsong era globalisasi. Seberapa jauh hukum positif di Indonesia telah mengimplementasi Hak Asasi Manusia.

Dalam buku ini, penulis ingin mengupas secara sekilas kaitan hak asasi manusia dengan hukum positif di Indonesia dalam kerangka menyongsong era globalisasi. Seberapa jauh hukum positif di Indonesia telah mengimplementasi Hak Asasi Manusia.

Dalam upaya untuk membangun tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Orde Baru menggunakan semboyan "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen". Semboyan tersebut sebenarnya mengambil semangat gerakan KAPI dan KAMI, yang juga sesuai dengan prasaran Driyarkara dalam simposium di Universitas Indonesia, bulan Juni 1966. Tekad Orde Baru tersebut semakin jelas setelah keluarnya Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/ 1966, yang mencoba mengoreksi kebijakan

Orde Lama di bidang sumber hukum, tata urutan peraturan perundang-undangan, dan skema kekuasaan.

Dalam perjalanan sejarahnya, pemerintahan Presiden Soeharto berupaya untuk menanamkan nilai-nilai dalam Pancasila pada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu didukung oleh MPR, dengan mengeluarkan TAP. MPR No. II/ MPR/ 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kehidupan politis, yang pada kelahiran Orde Baru dijanjikan akan lebih demokratis.

Pada setiap kesempatan aparat pemerintah berupaya meyakinkan masyarakat, baik dalam negeri maupun dunia internasional, bahwa pemerintah Indonesia sangat *concern* terhadap perlindungan hak asasi. Seperti misalnya ketika Feisal Tanjung, pada tanggal 29 Mei 1995 melepas Kontingen Garuda XIV B ke Bosnia, ia menegaskan, bahwa pengiriman kontingen kesehatan ABRI itu merupakan salah satu bukti kepedulian akan perlindungan hak asasi manusia. (Kompas, 30 Mei 1995).

Semboyan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang kemudian didukung dengan berbagai kebijakan tersebut, dalam kenyataannya hanya merupakan slogan yang tidak dilaksanakan. Kekosongan semboyan, yang menjelang keruntuhan Orde Baru banyak digugat oleh kaum intelektual, fenomenanya juga tampak secara tersirat dari pemberitaan surat kabar. Meskipun Pembukaan UUD 1945 dan sila kedua Pancasila itu menghendaki terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta UUD 1945 mencatumkan pasal-pasal yang menghormati hak asasi manusia (Pasal 26, 27, 28, dan Pasal 29), tindakan yang dilakukan oleh penguasa, yang tidak menghormati, merampas atau memperkosa hak asasi masih saja terjadi.

Kasus Kedung Ombo, Nipah, Tanjung Priok, Aceh dan masih banyak lagi dapat menjadi contoh yang jelas. Meskipun demikian, pemerintah selalu saja mencoba berkelit dan membantah keterlibatannya dengan mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi karena salah prosedur penanganan, dilakukan oleh oknum yang tidak disiplin atau lain-lain alasan penghindaran tanggung jawab.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali dibungkus dengan kata-kata yang manis. Hal itu juga dilakukan oleh pimpinan ABRI dalam pengamanan Sidang Umum MPR. Dikatakan, bahwa tindakan represif itu dapat dilakukan sebagai upaya terakhir yang terpaksa ditempuh demi kepentingan nasional serta melindungi dan menghormati hak asasi manusia dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan dan keselamatan negara. (Kompas, 8 Februari 1998). Sebulan kemudian, pada tanggal 31 Maret 1998 surat kabar mulai memberitakan hilangnya aktivis pro demokrasi yang oleh masyarakat dikaitkan dengan tindakan aparat keamanan, yang diinstruksikan untuk untuk meningkatkan pengamanan. Menanggapi opini tersebut Kapuspen BARI menyanggah, bahwa anggapan hilangnya aktivis pro demokrasi yang selalu dikait-kaitkan dengan operasi intelijen ABRI merupakan hal tidak fair. Seharusnya ada juga opini bahwa hilangnya aktivis tersebut merupakan bagian dari suatu rekayasa untuk memojokkan ABRI. (Kompas, 31 Maret 1998).

Di samping tindakan represif terhadap jasmani, pemerintah seringkali juga melakukan pembatasan dan pengekangan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. Dilarang beredarnya buku-buku yang dikarang oleh orang-orang tertentu, yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah (Kompas, 30 Mei 1995), diperingatkannya 19 peneliti LIPI yang pada tanggal 20 Januari 1998 menandatangani pernyataan keprihatinan terhadap situasi politik dan ekonomi negara (Kompas, 4 Februari 1998) merupakan contoh riil yang gamblang. Ekspresi mengeluarkan pendapat melalui pentas budayapun tidak lepas dari



pembatasan. Ketika Ratna Sarumpaet mementaskan monolog Marsinah Menggugat di Pusat Kebudayaan Perancis, ia diminta untuk membatalkan kegiatannya itu dengan alasan tidak ada ijin (Kompas, 7 Desember 1997).

Hak asasi di bidang kehidupan ekonomi yang oleh UUD 1945 dilindungi dan dijaminpun dalam kenyataannya sering diingkari oleh aparat pemerintah. Pasal 33 UUD 1945 mengatakan : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kenyataannya pemerintah sering membuat kebijakan yang bertentangan dengan jiwa Pasal 33 tersebut, misalnya dengan mengizinkan monopoli perdagangan kayu oleh Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) pimpinan Bob Hasan atau monopoli pengelolaan cengkeh oleh BPPC.

Penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah itu sering diberi dasar legalitas berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat seringkali dipakai untuk meniadakan sikap dan tindakan warga masyarakat yang dianggap bertentangan dengan kebijakan penguasa. Kasus sebagian rakyat Timor Timur di bawah pimpinan Xanana yang tidak ingin bergabung dengan Negara Republik Indonesia kemudian dianggap sebagai telah memberontak. Selain itu, perundang-undangan pidana yang dibuat setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 banyak juga yang tidak aspiratif karena dibuat hanya demi untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaan pihak yang sedang berkuasa.

Sesuai dengan sistem konstitusional, semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia harus didasarkan pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Apabila peraturan perundang-undangan itu tidak sinkron dengan UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan itu dikatakan tidak konstitusional. UUD 1945 disini mencakup pasal, struktur dan sistem. Jadi suatu peraturan perundang-undangan dikatakan konstitusional apabila tidak menyimpang dari pasal, struktur, atau sistem UUD 1945. Sedangkan peraturan perundang-undangan dikatakan menyimpang apabila mengurangi, menambah, dan melakukan substitusi terhadap pasal, struktur, atau sistem UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara itu terumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu suatu produk perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila dapat juga dikatakan tidak konstitusional.

Pembuatan suatu perundang-perundangan tidak terlepas dari politik pembangunan hukum nasional (O. Noto Hamidjojo 1968,98). Menurut Sudarto, politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat (Sudarto, 1981, 159). Pada kesempatan lain beliau mengatakan, bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1981, 159). Bertolak dari pengertian demikian, selanjutnya beliau mengatakan, bahwa melaksanakan politik hukum berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto, 161). Sedangkan politik hukum itu juga tidak terlepas dari politik dan strategi pembangunan nasional.

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk : " Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan pembentukan negara ini harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Apabila dikatakan bahwa politik pembangunan hukum itu berkaitan dengan politik pembangunan nasional, maka dapat juga dikatakan bahwa capaian-capaian yang ingin diraih dengan pembentukan hukum pidana pun tidak dapat terlepas begitu saja dengan tujuan pembangunan nasional. Apabila hasil dari pembentukan hukum pidana itu diwadahi dalam bentuk undang-undang, sedangkan tujuan pembangunan nasional itu harus dapat mewujudkan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, maka menurut TAP. MPRS No. XX/ MPRS/ 1966 pembentukan hukum pidana tersebut harus memperhatikan sinkronisasi vertikalnya dengan Pancasila.

Norma yang dirumuskan dalam kaedah hukum itu sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini terdapat suatu tantangan yang berat, yaitu bagaimana merumuskan dan membangun suatu sistem nilai yang sesuai dengan kebutuhan jaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kultural bangsa sendiri. Di bidang hukum pidana, nilai-nilai yang ingin diwujudkan didalamnya meliputi :

- a. Keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung setiap hukum pidana, yang mutlak harus dapat dicapai.
- b. Kesadaran warga masyarakat akan makna dan hahikat hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah sebagai tujuan akhir hukum pidana.
- c. Keserasian antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek batin) maupun kebaruan dan kelestarian harus dicapai dalam penerapan hukum pidana (*Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1989, 1*).

Nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan dalam perundang-undangan pidana tersebut juga tercermin dari fungsi dan tujuan hukum pidana. Dalam resolusi Seminar Hukum Nasional, tujuan hukum pidana dirumuskan untuk mencegah hambatan atau penghalang terciptanya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, dan sanksi pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu. Sedangkan Moeljatno secara ringkas mengatakan, bahwa hukum pidana berfungsi untuk pengayoman (*Moeljatno, 1983, 17-18*).

Wujud dari pengayoman tersebut adalah membimbing manusia dengan kepribadian penuh menjadi warga masyarakat yang baik, serta mampu untuk ikut serta dalam pembangunan. Fungsi hukum pidana demikian itu kiranya sesuai dengan fungsi hukum yang dikatakan oleh Padmo Wahyono, bahwa fungsi hukum adalah memberikan keadilan (*Padmo Wahyono dkk, 1989, 15*). Selanjutnya dikatakan, bahwa UUD 1945 telah menegaskan fungsi tersebut secara lebih diperluas dalam penjelasan pasal 28 UUD sebagai berikut : Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis, dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan (*Ibid*).

Dari penjelasan mengenai fungsi hukum di atas, maka sudah jelas bahwa hukum pidana yang dibuat harus mempunyai sifat responsif, dalam arti mampu menyerap dan memuat hasrat bangsa. Sifat responsif hukum pidana ini tidak hanya dikehendaki hanya pada hukum pidana materiil, tetapi juga pada hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Mengenai sifat keadaan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam masyarakat, Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakannya menjadi 3, yaitu :

1. Hukum represif, yakni hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
2. Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritasnya sendiri;
3. Hukum responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat (*Philippe Nonet and Philip Selsnick, 1978, 53*).

Pada uraian-uraian di muka telah dijelaskan bahwa yang menjadi landasan bagi pembangunan atau pembentukan hukum di Indonesia, sebagaimana juga halnya dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya, adalah Pancasila dan UUD 1945. Kita juga mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar filosofis negara mengandung nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh pendiri negara pada waktu itu, nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila tersebut dicoba untuk dijabarkan dalam UUD 1945, yang diakui masih bersifat ringkas ringkas dan sederhana. Sifat perumusan yang demikian itu mungkin merupakan keunggulan dari UUD 1945, karena lebih mudah untuk mengadakan penyesuaian dengan perkembangan jaman. Namun demikian sifat ringkas dan sederhananya UUD 1945 itu merupakan tantangan paling berat bagi perumus hukum di Indonesia untuk menafsirkan dan merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Mohtar Mas'ood mengatakan, bahwa banyaknya pasal dalam UUD 1945 yang belum sempat ditafsirkan ke dalam undang-undang pelaksanaan akan menimbulkan banyak *loopholes* yang memungkinkan kekuatan yang paling berkuasa untuk memberikan penafsiran yang selaras dengan nilai dan kepentingannya (*Mohhtar Mas'ood, 1992, 147*). Padahal ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 memperlihatkan bahwa dari tiga badan kekuasaan yang dikenal dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga eksekutif mempunyai peranan yang dominan. Peranan lembaga eksekutif itu semakin bertambah besar dalam kenyataannya, karena DPR sebagai lembaga kontrol tidak mempunyai kemampuan atau diberi kesempatan untuk mengimbangi badan eksekutif.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Dari uraian singkat latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut : seberapa jauh transformasi nilai - nilai Pancasila dalam hukum positif di Indonesia.

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi dan mengidentifikasikan peraturan perundang-undangan pidana yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pembentukan hukum pidana.

## 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pengambil kebijakan, terutama badan-badan legislatif untuk dapat meninjau ulang produk perundang-undangan pidana yang tidak sinkron dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis filosofis (*H.Hilman Hadikusuma, 1993,61*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelusuran terhadap perundang-undangan pidana yang sekiranya tidak sinkron dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berpusat pada data sekunder, yaitu berupa perundang-undangan pidana yang berlaku atau dikeluarkan pada masa orde baru. Adapun yang menjadi data sekunder disini merupakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan pidana yang diidentifikasi tidak sinkron dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Data sekunder yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini didapatkan dari kepustakaan, baik dalam bentuk literatur maupun dokumentasi resmi (*ibid*).

### 3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi dari penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik di bidang hukum materiil, hukum formil, yang berlaku atau dikeluarkan pada masa orde baru. Dari populasi demikian itu lalu diambil beberapa perundang-undangan pidana dengan menggunakan teknik random sampling, sehingga didapatkan beberapa peraturan perundang-undangan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan menelusuri perundang-undangan pidana yang pernah berlaku atau dikeluarkan pada masa oprde baru, yang tidak sinkron dengan ketentuan UUD 1945.

### 5. Metode Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di muka, maka data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan memverifikasikan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pidana yang diteliti dengan menggunakan tolok ukur nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, kemudian dibuat suatu sintesis yang berupa penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini analisis juga akan dicoba untuk dikaitkan dengan praktek penggunaan perundang-undangan pidana yang dimaksud.

## BAB II

### TINJUAN UMUM PUSTAKA

#### A. Sekilas Pemahaman tentang Manusia.

Pemahaman tentang manusia merupakan suatu tema yang menarik dan selalu aktual. Aktual karena di setiap saat pembicaraan tentang manusia dalam berbagai dimensinya selalu dibahas. Salah satu dimensi manusia yang kerap dan aktual dibincangkan adalah Hak Asasi Manusia.

Sebelum terlalu jauh membahas tentang hak asasi manusia, ada baiknya mengupas pemahaman tentang manusia dari kajian filosofis. Hal ini diperlukan guna memberi dasar dan kelengkapan dalam membahas dimensi manusia termasuk didalamnya hak asasi manusia.

Pertanyaan mendasar : Apa, Siapa dan Bagaimana manusia itu ? Sebenarnya pertanyaan mendasar ini bukanlah hal yang mudah ditemukan jawabannya. Akan tetapi sekalipun tidak menemukan jawaban yang memuaskan, pemahaman tentang manusia terbuka juga.

Driyarkara memberikan gambaran tentang manusia sebagai berikut :

1. Manusia adalah makhluk yang berhadapan dengan diri sendiri. Dia bersatu dan berjarak terhadap diri sendiri.
2. Manusia juga makhluk yang berada dan menghadapi alam kodrat. Dia merupakan kesatuan dengan alam, tetapi juga : berjarak. Dia bisa memandangnya, mempunyai pendapat-pendapat terhadapnya, bisa merubah dan mengolahnya.
3. Manusia itu selalu hidup dan mengubah dirinya dalam arus situasi yang konkrit. Dia tidak hanya merubah dalam tetapi juga karena diubah oleh situasi itu. Namun dalam berubah-ubah ini, dia tetap dia sendiri. Dengan ini dia menyejarah (N. Driyarkara, 1989 : 7).

Dengan gambaran yang diberikan oleh Driyarkara, tampaklah bahwa manusia adalah makhluk yang tidak statis. Ia selalu berubah -bergerak dalam arus situasi diri sendiri dan lingkungannya. Atau dengan kata lain manusia adalah makhluk yang dinamis. Oleh karena manusia itu dinamis, ia selalu menemukan pembaharuan-pembaharuan dalam hidupnya.

Manusia hidup dalam alam kodrat, manusia kodrati tampak tidak bisa dilepaskan dari alamnya. Sekalipun manusia mampu mengubah atau memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhannya, ia tetap tidak bisa dipisahkan dari alamnya. Dan manusia kodrati adalah manusia yang selalu berubah-mengubah dirinya dalam arus situasi yang konkrit untuk semakin menuju pada kesempurnaan dirinya.

Dengan melihat pada kemauan dan kemampuan manusia berubah dalam dirinya sendiri dan dalam lingkungannya, tampaknya bahwa manusia memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri. Dan kesadaran terhadap dirinya inilah yang mampu membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain.

"Manusia mengalami diri sendiri sebagai seorang "aku". Dengan kata lain, ia tidak menerima hidupnya secara pasif saja, tetapi ia "tahu" bahwa ia ada. Ia tahu, bahwa semua terjadi, baik di dalam dia maupun di luar, ada hubungannya dengan dia " (P. Leenhouders, 1988 : 64).

Manusia yang mengenal dirinya sebagai "aku" menunjukkan bahwa manusia mampu mengenali pribadinya. Kesadaran diri sebagai pribadi menunjukkan bahwa manusia individu mampu mengenali dan membedakan dirinya sendiri dengan sesamanya. Maka manusia individu mampu membedakan antara "aku" dan "kita".

Kesadaran manusia individu akan "aku" terwujud dengan adanya keterbukaan terhadap dirinya sendiri. Dan ketika manusia individu menyatakan dirinya sebagai "aku" ia merupakan suatu pribadi yang unik dalam segala totalitasnya. Unik karena ia berbeda antar individu yang satu dengan individu yang lain. Ia mencapai totalitasnya, manusia jasmani dan rohani yang memiliki multi aspek.

Hardono Hadi mengungkap bahwa jati diri manusia mengandaikan adanya kesatuan yang utuh di dalam diri manusia. Kesatuan ini begitu mutlak sehingga terasa begitu jelas ketunggalan di dalam diri sendiri yang tidak bisa dibagi-bagi. (Hardono Hadi, tt : 49). Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam jati diri manusia adalah :

1. aspek manusia sebagai makhluk hidup yang terdiri dari macam-macam taraf yang berbeda-beda.
2. aspek manusia yang dianugerahi dengan rasio sebagai mahkota martabat pribadinya.
3. aspek manusia sebagai pelaku yang menyadari maksud tindakannya.
4. aspek proses dan perubahan.
5. aspek manusia sebagai makhluk sosial.
6. aspek kebebasan yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan lain. (Hardono hadi, tt :53).

Manusia dalam bahasa filsafat mempunyai berbagai sebutan yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Di antara berbagai sebutan yang muncul dalam wacana filosofis menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang dapat mengaktualkan dirinya secara total. Total dalam arti mampu mengakomodasikan kemampuan-kemampuan yang terdapat dalam dirinya. Potensi-potensi yang terdapat dalam diri manusia ialah potensi naluri, kemampuan merasa dan kemampuan berpikir. Dalam bahasa filsafat sebutan manusia adalah sebagai berikut :

1. Anima rationale, manusia adalah makhluk hidup yang berpikir. Di sini tampak bahwa manusia adalah makhluk yang mampu menggunakan daya pikirnya untuk mencari dan menemukan sesuatu yang dibutuhkan dalam hidupnya.

2. *Homo sapiens*, manusia arif yang memiliki akal budi dan dengan demikian mengungguli semua makhluk yang lain.
3. *Homo faber*, manusia tukang yang menggunakan alat-alat dan malah memproduksi alat-alatnya sendiri.
4. *Homo ludens*, manusia yang bermain, khususnya ia ingin menyelidiki perkaitan antara permainan dan kebudayaan. Untuk itu ia dapat mempergunakan pengetahuannya yang amat luas. (K. Bertens, 1987 : 1).

Dari berbagai uraian di atas secara sederhana dapatlah dijawab tentang apa, siapa dan bagaimana manusia itu. Manusia adalah makhluk yang senantiasa berubah-bergerak menjadi-dia tidak akan pernah berhenti memperbaharui diri sendiri. Ia sadar bahwa dirinya selalu dapat berhadapan dengan dirinya dan alamnya. Dengan kesadaran inilah manusia sampai pada pemahaman tentang "aku" sebagai pribadi yang membedakan dengan orang lain. Dan dengan "aku" sebagai pribadi manusia menemukan keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi, ia merupakan unitas (kesatuan) yang utuh dalam kompleksitasnya (keanekaragamannya). Dengan berbagai potensi yang dimilikinya-naluriyah, perasaan, pemikiran manusia menemukan keutuhan dirinya dan martabatnya sebagai manusia yang secara kodrati berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain.

Kaitan dengan hak asasi manusia sebagai dasar bagi hidup manusia. Adalah menjadi hak bagi setiap manusia individu untuk dapat memiliki hidup, baik hidup jasmani maupun hidup rohani. Hidup jasmani adalah hidup manusia dalam aspek ragawi, manusia yang membutuhkan makan, papan, sandang sebagai penunjang kelangsungan hidup biologisnya. dan hidup rohani adalah hidup manusia dalam aspek-aspek yang lebih metafisis, yaitu kebutuhan hidup manusia untuk mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai macam pola kehidupan.

Dengan kata lain dengan hak asasinya manusia berhak hidup untuk menjadi dirinya yang unik dalam dirinya sendiri maupun dalam lingkungan. Ia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Penghormatan dan penghargaan terhadap pribadi manusia yang unik merupakan pemikiran dasar yang sebaiknya melandasi dari pemahaman tentang hak asasi manusia. Namun konsep ini bukanlah harus terjebak dalam paham individualisme dan juga kolektivisme. Sebab pembahasan yang dimaksud adalah pembahasan tentang pemahaman tentang manusia secara filosofis yang tidak berdasar pada paham individualisme dan kolektivisme.

#### **B. Pengertian Hak Asasi Manusia.**

"Secara harfiah yang dimaksud dengan Hak-hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar" (Yudana, tanpa tahun : 13).

Jadi hak asasi itu merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.



Berkaitan dengan hal tersebut sosiolog Universitas Kristen Satya Wacana, Arief Budiman menyatakan :

Bahwa Hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi manusia itu melekat pada dirinya sebagai manusia, dalam hal ini hak asasi manusia berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan hak warga negara dan hak asasi manusia (Suara Merdeka, 21 Desember 1992).

Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlom Naning, seorang pengacara, menyatakan bahwa :

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci (Naning, 1983 : \*).

Wolhoff, dalam kaitannya dengan hal tersebut menyatakan :

Bahwa hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia, justru karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu (Wolhoff, 1960 : 13).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian sejumlah hak mengandung arti lebih dari satu hak dan tentu saja merupakan hak-hak yang pokok atau yang mendasar, misalnya hak hidup, sebab itu merupakan hak yang kodrati, melekat dan berakar pada diri manusia. Sebagai konsekuensi dari hak hidup itu, maka manusia berhak memenuhi kebutuhan hidupnya itu, juga merupakan hak asasi pula.

Anton Baker memberi batasan hak asasi manusia sebagai berikut : berarti hak itu ditemukan dalam hakekat manusia, demi kemanusiaannya semua orang satu persatu memilikinya, tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan tidak dapat dilepaskan oleh individu itu sendiri, karena hak itu bukan sekedar hak milik saja, tetapi lebih luas dari itu manusia memiliki kesadaran (berkehendak bebas berkesadaran moral). manusia mahluk ciptaan Tuhan merupakan mahluk ciptaan yang tertinggi di antara mahluk ciptaan lainnya, yang di dalam hidupnya manusia dikaruniai Tuhan berupa hak hidup yang merupakan hak asasi yang paling pokok yang dibawa sejak lahir di dunia sebagai anugerah dari Tuhan. (Jurnal Filsafat Seri 2, Mei 1990).

Mencermati batasan yang dikemukakan Baker tersebut di atas, maka ada sedikit perbedaan dengan batasan-batasan terdahulu, yakni Baker menekankan bahwa Hak Asasi Manusia bukan sekedar hak milik saja. Penulis sangat sependapat dengan Baker, karena memang hak asasi manusia mau tidak mau harus disertai dengan tanggung jawab sebagai suatu kesadaran moral. Individu itu sendiri (penyandang hak) tidak dapat melepaskan begitu saja terhadap haknya, seperti misalnya melepaskan hidupnya/mengakhiri hidupnya (bunuh diri) hal itu merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia khususnya manusia dirinya sendiri. Suatu hal teramat penting dalam kaitan ini ialah bahwa bunuh



diri merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Allah sebagai pencipta, dalam arti meniadakan ke ILAHIAN ALLAH.

Adanya kesadaran moral/tanggung jawab yang melekat dalam diri manusia itu menunjukkan gambaran pada manusia bahwa mati bukan merupakan hak asasi, sehingga bunuh diri merupakan suatu tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan.

Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat ditarik suatu garis besar bahwa hak asasi manusia itu ada justru karena kemanusiaannya manusia itu, hal ini disebabkan karena manusia memiliki harkat dan martabat yang tidak pernah akan ada pada makhluk lain, sehingga hanya pada manusialah hak asasi itu ada padanya. Oleh karena manusia diciptakan Allah dan secitra denganNya, maka hak asasi dalam diri manusia itu haruslah dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia lainnya.

Hak asasi manusia tidak boleh dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Ini berarti harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan manusia tidak lagi dihormati dan diakui. Hak asasi manusia merupakan sesuatu hak yang awali, bukan sesuatu pemberian dari masyarakat atau negara, hak itu adalah hak hidup dengan segala kebebasannya untuk menyatakan cipta, karsa dan rasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berlandaskan dari uraian di atas, maka Hak-hak Asasi Manusia meliputi keseluruhan penjabaran dari hak hidup itu, atau segala sesuatu usaha untuk kelangsungan hidup manusia. Hak-hak itu antara lain :

- Hak untuk memperoleh penghidupan
- Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
- Hak untuk memperoleh kesehatan
- Hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat
- Hak untuk memperoleh pekerjaan
- Hak untuk memilih pasangan hidupnya
- Hak untuk memeluk suatu agama/kepercayaan
- Hak untuk berbicara/mengemukakan pendapat
- Hak untuk memperoleh pendidikan
- Hak untuk berserikat/berkumpul dan lain sebagainya
- dan masih banyak lagi hak-hak asasi yang lainnya.

Semua hak-hak tersebut merupakan suatu rangkaian usaha untuk mempertahankan hidupnya sebagai suatu hak yang awali.

Untuk mengakhiri pembahasan pengertian hak asasi manusia, penulis ingin menyampaikan batasan hak asasi manusia, sebagai tambahan analisis. Hal ini kerana beberapa batasan tersebut di atas belum memberikan kepuasan bagi penulis. Batasan-batasan di atas hanya memberi gambaran hak asasi manusia setelah manusia itu dilahirkan dan hidup, sedangkan kehidupan di dalam kandungan belum tersentuh. Oleh karena itu penulis memberikan batasan hak asasi manusia sebagai berikut : Hak Asasi

Manusia adalah hak yang awali, dalam arti hak-hak dasar yang fundamental yang melekat pada diri manusia sejak terjadinya pembuahan dalam (kandungan atau tabung) yang merupakan kasih Allah kepada manusia. Karena kehidupan itu diciptakan Allah, maka hak-hak dasar yang melekat dalam diri manusia itu mutlak harus dihormati dan dijunjung tinggi. Pelanggaran hak-hak tersebut, tidak hanya berarti hilangnya sifat kemanusiaan manusia itu, tetapi lebih luas dari hal itu yakni menghilangkan sifat ke Ilahian Allah sendiri.

Mendasarkan batasan tersebut segala bentuk tindakan untuk mengakhiri kehidupan dalam kandungan (aborsi) merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu kehidupan dalam kandungan menuntut untuk mendapat perawatan pemeriksaan untuk dipersiapkan lahir hidup. Dengan perkataan lain janin/faetus yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan mereka yang sudah lahir.

### **C. Pangkal Tolak Munculnya Pemikiran Hak Asasi Manusia Dan Perkembangannya Di Indonesia.**

Berlandaskan pengertian hak asasi manusia seperti tersebut di atas, sebenarnya hak asasi manusia timbulnya bersamaan dengan lahirnya manusia itu sendiri, atatu dengan kata lain, lahirnya hak asasi manusia itu bersamaan dengan lahirnya umat manusia, sehingga hak asasi itu, ada sejak jaman dahulu kala, semenjak adanya manusia yang menyangang hak-hak tersebut.

Atas dasar hal itu, sebenarnya hak asasi manusia bukan merupakan suatu masalah, akan tetapi hak asasi manusia itu menjadi suatu masalah manakala manusia-manusia itu berkumpul menjadi satu dan ingin melaksanakan hak asasinya itu. Dengan perkataan lain persoalan hak asasi manusia adalah persoalan konkritisasi/realisasi/implementasi hak-hak asasi manusia tersebut dalam hidupnya bersama-sama dengan manusia-manusia lainnya. Di sinilah mulai munculnya kesadaran akan hak asasi manusia. Bersamaan dengan hal itu, muncul pemikiran-pemikiran mengenai hak asasi manusia dalam hidupnya bermasyarakat.

Pemikiran pertama yang secara sistematis merenungkan masalah-masalah kehidupan manusia yang terikat dalam satu tertib organisasi/negara adalah Aristoteles dari Yunani yang hidup sekitar abad ke IV SM, menyatakan bahwa : Agar tercapai tujuan kehidupan manusia maka manusia membutuhkan manusia lain, oleh karena itu mutlak diperlukan masyarakat agar individu dapat mempunyai arti sebagai manusia dan hanya dalam bermasyarakatlah manusia dapat berkembang sebagai individu (Reinhart, 1985 : 22).

Pandangan Aristoteles ini mendapat tempat pada masa itu, namun dalam perkembangannya mengalami kekacauan yang pada akhirnya dapat pula diatasi oleh gereja yang memegang peranan yang besar dalam perkembangan kebudayaan, kemasyarakatan dan kenegaraan.

Pada abad ke XII Thomas Aquinas menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan masyarakat agar dapat mempererkembangkan kepribadiannya dengan mempergunakan ratio yang diberikan oleh alam kepadanya, sebagai konsekuensi logis, maka diperlukan kestabilan dalam masyarakat agar tidak terjadi kekacauan, karena itulah diperlukan penguasa di bawah raja.

Thomas Hobbes, seorang filsuf yang hidup tahun (1588 - 1679) terkenal dengan teori perjanjiannya, mengemukakan bahwa : Setiap individu harus mengadakan perjanjian antara sesamanya, menyerahkan sebagian haknya kepada raja demi kepentingan-kepentingan individu itu sendiri, akan tetapi raja tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian, sehingga ia tidak terikat dalam perjanjian itu (Reinhart, 1985 : 24).

Teori Hobbes ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kerajaan-kerajaan yang bersifat absolut atau yang bertendensi kearah itu. Namun di dalam kenyataannya kepentingan individu tidak terlindungi, tetapi justru menimbulkan berbagai penderitaan/kesengsaraan rakyatnya, kemelaratan, kekuasaan raja tidak terbatas, sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya.

Pada tahun 1682 - 1701 muncul ide baru yang menentang/menghancurkan teori perjanjian dari Thomas Hobbes, yakni munculnya John Locke dengan idenya bahwa pada diri manusia terdapat hak yang tidak bisa dipunahkan, oleh karena hak itu merupakan pemberian alam kepadanya, hak-hak tersebut adalah life, liberty dan prosperity. Tidak satupun kekuasaan yang dapat mencabut hak-hak tersebut, bahkan penguasa harus melindungi dari segenap bentuk pemerkosaan (Naning, 1983 : 10).

Berdasarkan/bertolak dari ajaran John Locke tersebut di atas, Hak-hak Asasi Manusia mulai dikembangkan. Pada awalnya berkembang di dunia barat, yang kemudian menjadi dasar falsafah hidup orang barat. Berlandaskan hal tersebut orang barat mulai bangkit berbicara untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Seperti misalnya muncullah seorang tokoh, yakni JJ Rousseau yang terkenal dengan teori "contrac social" nya, yang menyatakan bahwa :

"Kekuasaan negara itu timbulnya karena berdasarkan atas suatu persetujuan atau kontrak antara seluruh anggota masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan" (Rousseau, 1986 : 14).

Munculnya JJ Roesseau ini, meningkatlah usaha untuk menjamin dan melindungi hak dan kebebasan asasi manusia.

Dalam perkembangannya lebih lanjut teori John Locke dan JJ Rousseau mempunyai pengaruh besar terhadap Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, karena ajaran mereka dipegang teguh ketika menetapkan "Declaration Of Independence" pada tanggal 4 Juli 1776, sebagai puncak perjuangan hak asasi manusia. Dalam Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa : seluruh umat manusia ditakdirkan dalam keadaan sama, bahwa manusia dikaruniai oleh Tuhan yang maha kuasa beberapa hak yang tetap dan

melekat padanya. Perumusan hak asasi manusia secara resmi itu kemudian menjadi dasar pokok konstitusi negara Amerika Serikat tanggal 4 Maret 1789 (Hardjowigoro, 1977 : 43).

Walaupun Amerika Serikat yang pertama kali menerima secara resmi hak asasi manusia tersebut, namun sebenarnya rakyat Perancis telah memperjuangkannya sejak JJ Ruesseau, perjuangan itu memuncak sejak revolusi Perancis dan berhasil menetapkan hak asasi manusia dalam "declaration des Droit de l'homme at du Citoyen 1780", yang ditetapkan oleh Ansamble Nationale dan kemudian tahun 1791 dimasukkan dalam konstitusinya (Purbopranoto, 1976 : 18).

Pertanyaan yang muncul setelah membaca uraian singkat di atas adalah, bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia ?

Tidak munculnya pemikir-pemikir dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia dalam mengemukakan teori-teori ataupun gagasan-gagasan seperti, Aristoteles, Thomas Aquinas, Thomas Hobbes, John Locke dan JJ Roesseau dapat dimengerti dan dipahami, sebab telah diuraikan di atas bahwa semua pemikir-pemikir bergerak di arus sejarah pemikir barat yang memperoleh sumber filsafat Yunani. Ini tidak berarti bahwa Bangsa Indonesia masa bodoh terhadap hak asasi manusia dan warganegara, tetapi hak asasi manusia di Indonesia tidaklah menjadi masalah sebab Bangsa Indonesia telah mengakui dan melindungi hak asasi manusia.

Untuk mengetahui bagaiman perkembangan/pangkal tolak munculnya pemikiran hak asasi manusia di Indonesia kita bisa lakukan pengkajian sejarah lahirnya negara Indonesia.

Pada masa penjajahan, sejarah menunjukkan bahwa negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun kemudian dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Penjajahan tersebut bukan hanya orang-orangnya saja, melainkan seluruh aspek kehidupan (IPOLEKSOSBUD HANKAM) bangsa Indonesia dijajah. Realitas saat itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak sempat berfikir tentang hak asasi manusia. Praktis hak asasi manusia Indonesia tidak dihormati dan tidak dihargai sebagai manusia yang bermartabat. Kemiskinan, kebodohan, penderitaan mewarnai bangsa Indonesia saat itu apa yang ada dalam benak pemikir bangsa Indonesia hanyalah bagaimana melawan penjajah, penindasan, perkosaan yang merusak dan tidak menghargai martabat manusia Indonesia.

Setelah mengakhiri masa penjajahan, bangsa Indonesia masuk pada masa kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Suatu hal yang istimewa dan luar biasa terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya UUD 1945. Di dalam pembukaan (Preamble) alinea pertama dan keempat menunjukkan dengan jelas bahwa Pembukaan UUD 1945 penuh dengan muatan hak asasi manusia.

Pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, mengandung pula arti atau makna kemerdekaan terhadap setiap manusia sebagai individu anggota masyarakat.

Dengan perkataan lain pada alinea pertama ini merupakan pernyataan hak asasi manusia sekaligus hak asasi masyarakat.

Mencermati alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945 pada khususnya dan keseluruhan alinea Pembukaan UUD 1945 pada umumnya dan kita bandingkan dengan Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR 1948), dari sudut pandang sejarah pemikiran hak asasi manusia, maka kita bangsa Indonesia boleh bangga dan berbesar hati, karena bangsa Indonesia telah lebih dahulu menyatakan pada dunia tentang kemerdekaan sebagai pernyataan hak asasi manusia. Dengan perkataan lain Pembukaan UUD 1945 merupakan piagam/ pernyataan hak asasi manusia di Indonesia.

Seperti kita ketahui dalam sejarah bangsa Indonesia, bahwa setelah Negara Indonesia merdeka, tidak berjalan dengan mulus, tetapi banyak hambatan, gangguan, dan ancaman, sampai pada pemberontakan yang mengganggu stabilitas nasional.

Kondisi yang demikian ini, mengakibatkan sejarah perkembangan Negara Indonesia ditandai dengan pernah berlakunya tiga macam undang-undang dasar, yang mendasari perjuangan Bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam lima periode yang berbeda. Kelima periode tersebut, adalah :

1. Periode pertama dengan berlakunya UUD 1945 (tanggal 18-8-1945 s/d 26-12-1949);
2. Periode kedua dengan berlakunya Konstitusi RIS (27-12-1949 s/d 16-8-1950);
3. Periode ketiga dengan berlakunya UUD Sementara (17-8-1950 s/d 4-7-1959);
4. Periode keempat dengan berlakunya kembali UUD 1945 (5-7-1959 s/d 11-3-1966); dan
5. Periode kelima dalam kurun waktu 11-3-1966 sampai sekarang ini, meletakkan UUD 1945 sebagai landasan perjuangan bangsa Indonesia.

Apabila kita membaca dengan seksama dan memahami ketiga jenis Undang-Undang Dasar tersebut, maka di dalam pasal-pasal nya kita dapat menemukan butir-butir perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia Indonesia, yakni di dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 33 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tersebut sebagai berikut :

#### Pasal 7

- 1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang.
- 2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang.
- 3) Segala orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
- 4) Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

**Pasal 8**

Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya.

**Pasal 9**

- 1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam pembatasan negara.
- 2) Setaip orang berhak meninggalkan negeri dan jika ia warga negara atau penduduk kembali ke situ.

**Pasal 10**

Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur dan diperhamba. Perbudakan perdagangan budak dan perhambaab dan segala perbuatan apa pun yang tujuannya kepada itu terlarang.

**Pasal 11**

Tiada seorang juga pun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.

**Pasal 12**

Tiada seorang juga pun ditangkap ayau ditahan, selainnya atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan Undang-undang dalam hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya.

**Pasal 13**

- 1) Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak.
- 2) Bertentangan dengan kemauannya tiada seorang jua pun dapat dipisahkan daripada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

**Pasal 14**

- 1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku dan ia dalam sidang itu diberikan segala jamina yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.
- 2) Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhkan hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.
- 3) Apabila ada perubahan dalam aturan seperti tersebut dalam ayat di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi si tersangka.

**Pasal 15**

- 1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan pun boleh diancamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunyaannya yang bersalah.
- 2) Tidak satu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

**Pasal 16**

- 1) Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu gugat.
- 2) Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

**Pasal 17**

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu gugat, selainnya daripada atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan ini.

**Pasal 18**

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama, hak ini meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan beribadat mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.

**Pasal 19**

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

**Pasal 20**

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara resmi damai diakui sekedar perlu dijamin dalam peraturan undang-undang.

**Pasal 21**

- 1) Setiap orang berhak dengan bebas mengajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tertulis.
- 2) Setiap orang berhak mengajukan permohonan kepada penguasa yang sah.

**Pasal 22**

- 1) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang.
- 2) Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah.



- 3) Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang.

**Pasal 23**

Setiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.

**Pasal 24**

- 1) Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga negara dalam suatu golongan rakyat.
- 2) Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat alam diperhatikan.

**Pasal 25**

- 1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- 2) Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.

**Pasal 26**

- 1) Pencabutan hak (onteigening) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak diperbolehkan, kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan Undang-undang.
- 2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian menurut aturan-aturan Undang-undang kecuali jika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.

**Pasal 27**

- 1) Setiap warga negara, dengan menurut syarat-syarat kesanggupan, berhak atas pekerjaan yang ada.  
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang ada
- 2) Setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia.

**Pasal 28**

Setiap orang berhak mendirikan serikat kerja dan masuk ke dalamnya untuk memperlindungi kepentingannya.

**Pasal 29**

- 1) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan Undang-undang.
- 2) Memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas.



**Pasal 30**

Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran partikular, dan mencari dan mempunyai harta untuk maksud-maksud itu diakui.

**Pasal 31**

Setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh kepada Undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa yang sah dan yang bertindak sah.

**Pasal 32**

- 1) Peraturan-peraturan Undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tidak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi.
- 2) Jika perlu, Undang-undang federal menentukan pedoman dalam hal itu bagi Undang-undang daerah-daerah bagian.

**Pasal 33**

Tiada suatu ketentuan pun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak daripadanya untuk menguasai sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apa pun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan yang diterangkan dalamnya.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUD'S 1950) perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dirumuskan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14, sebagai berikut :

**Pasal 7**

- 1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang
- 2) Sekalian orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-undang
- 3) Sekalian orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
- 4) Setiap orang berhak mendapat bantuan-bantuan yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan kepadanya menurut hukum.

**Pasal 8**

Sekalian orang yang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta bendanya.

**Pasal 9**

- 1) Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan negara.
- 2) Setiap orang berhak meninggalkan negeri dan jika ia warga negara atau penduduk kembali ke situ.

**Pasal 10**

Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur dan diperhamba, Perbudakan perdagangan budak dan perhambaan dan segala perbuatan apa pun yang tujuannya kepada itu, dilarang.

**Pasal 11**

Tiada seorang juga pun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum secara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.

**Pasal 12**

Tiada seorang juga pun ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan Undang-undang dalam hal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya.

**Pasal 13**

- 1) Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya, mendapat perlakuan jujur dalam perkaranya oleh hakim yang memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadapnya beralasan atau tidak.
- 2) Bertentangan dengan kemampuannya tiada seorang jua pun dapat dipisahkan daripada hakim, yang diberikan kepadanya oleh aturan-aturan hukum yang berlaku

**Pasal 14**

- 1) Setiap orang yang dituntut karena tersangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku dan dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.
- 2) Tiada seorang jua pun boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.
- 3) Apabila ada perubahan dalam aturan seperti tersebut dalam ayat di atas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik bagi si tersangka.

**Pasal 15**

- 1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan pun boleh diancamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunyaannya yang bersalah.
- 2) Tidak satu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

**Pasal 16**

- 1) Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu gugat.
- 2) Menginjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam suatu aturan hukum yang berlaku baginya.

**Pasal 17**

Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menyurat tidak boleh diganggu gugat, selainnya dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal yang diterangkan dalam peraturan ini.

**Pasal 18**

Setiap orang berhak atas kebebasan agama keinsyafan batin dan pikiran

**Pasal 19**

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.

**Pasal 20**

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan Undang-undang.

**Pasal 21**

Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan Undang-undang.

**Pasal 22**

- 1) Sekalian orang tak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak dengan bebas memajukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.
- 2) Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak memajukan permohonan pada penguasa.

**Pasal 23**

- 1) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang.
- 2) Setiap warga negara dapat diangkat dalam tiap-tiap jabatan pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang.

**Pasal 24**

Tiap warga negara berhak dan berkewajiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan negara.

**Pasal 25**

- 1) Penguasa tidak akan mengingatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknya warga negara dalam suatu golongan rakyat.
- 2) Perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan hukum golongan rakyat akan diperhatikan.

**Pasal 26**

- 1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- 2) Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.
- 3) Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.

**Pasal 27**

- 1) Pencabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan kecuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan Undang-undang.
- 2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun baik untuk selama-lamanya maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan Undang-undang kecuali jika ditentukan yang sebaliknya oleh aturan-aturan itu.

**Pasal 28**

- 1) Setiap warga negara, sesuai dengan kecakapannya berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan dan berhak pula atas syarat-syarat perburuhan yang adil.
- 3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama dalam hal-hal yang sama, berhak atas pengupahan yang sama dan atas perjanjian-perjanjian yang sama.
- 4) Setiap orang yang melakukan pekerjaan, berhak atas pengupahan adil yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia.

**Pasal 29**

Setiap orang berhak mendirikan serikat-serikat dan masuk ke dalamnya untuk memperlindungi kepentingannya.

**Pasal 30**

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- 2) Memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas.
- 3) Mengajar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan Undang-undang.

**Pasal 31**

Kebebasan melakukan pekerjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan juga untuk pengajaran pertikulir, dan mencarikan, mempunyai atau untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan Undang-undang.

#### Pasal 32

Setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh kepada Undang-undang termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa.

#### Pasal 33

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan Undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tidak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.

#### Pasal 34

Tiada suatu ketentuan pun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak daripadanya untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apa pun yang bermaksud menghapuskan sesuatu hak.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dirumuskan dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 29 dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 34, tersebut sebagai berikut :

#### Pasal 27

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu, dengan tidak ada kecuali.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

#### Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.

#### Pasal 29

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

#### Pasal 31

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

- 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

#### Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

#### Pasal 33

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Membaca dan memahami ketiga jenis Undang-Undang Dasar tersebut, nampak bahwa perkembangan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 dirumuskan secara lebih sederhana dan singkat. Mengingat UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok-pokok saja, maka lebih lanjut pengaturan/penjabarannya diserahkan pada peraturan-peraturan yang lebih rendah tingkatannya, seperti misalnya penjabarannya dalam UU Perkawinan, UU Agraria, UU Hukum Acara Pidana, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dan lain sebagainya.

Mengingat bahwa Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai Sumber Segala Sumber Tertib Hukum, maka penjabaran hak asasi manusia itu haruslah merupakan pencerminan dari kelima sila dalam Pancasila, atau dengan kata lain penjabaran hak asasi manusia Indonesia haruslah dijiwai dengan semangat Pancasila.

Perlu kita ketahui juga, bahwa Bangsa Indonesia sekarang ini telah lebih baik atau maju dibanding dengan bangsa di dunia barat, dalam hal hak asasi manusia, hal ini dikarenakan Bangsa Indonesia tidak hanya berfikir tentang perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia saja, tetapi lebih jauh dari itu telah menuju pada pemikiran mengenai kewajiban asasi manusia, hal tersebut dapat dibaca dalam Ketetapan MPR No. II/MPR RI/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Faktula Perumusan Pancasila

1. Tanggal 9 Maret 1942 : Sekutu "menyerah kepada Jepang  
: Sejak saat itu Hindia Belanda secara resmi berada di bawah kekuasaan Tentara Jepang.
2. Pertengahan 1944 : Jepang mulai "terdesak" oleh Sekutu
3. Tanggal 7 September 1944 : PM. Jepang atas nama Pemerintah Jepang mengeluarkan "janji Kemerdekaan Indonesia"  
: "Janji Politik"  
: Rencana Jepang akan memberi Kemerdekaan 24 Agustus 1945
4. Tanggal 29 April 1945 : Dibentuk "BPUPKI" untuk melaksanakan janji politik tersebut.  
: Menurut Ilmu Hukum Tata Negara BPUPKI tidak perlu dipersiapkan keabsahannya.
5. Tanggal 28 Mei 1945 : BPUPKI dilantik oleh Jepang

##### Susunan :

- |            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Ketua      | : Dr. Radjiman W                      |
| Ketua Muda | : "Ichibangase"<br>RP. Suroso         |
| Anggota    | : 66 Orang lebih<br>7 orang ( Jepang) |

##### Tujuan/Maksud Pembentukan BPUPKI

- 1) Untuk menyelidiki hal-hal penting tentang dan sekitar Kemerdekaan Indonesia dan
- 2) Menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan Kemerdekaan.  
atau : Mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan kemerdekaan Indonesia, antara lain :
  - a. Menyusun "Rancangan dasar Negara"
  - b. Menyusun "Undang-Undang Dasar Negara"

BPUPKI : Setelah selesainya tugas maka BPUPKI menyerahkan hasilnya kepada PPKI

PPKI : Sebagai badan yang secara hukum berwenang mengambil keputusan tentang bahan-bahan yang berhubungan dengan Kemerdekaan Indonesia.



## 6. Persidangan BPUPKI.

- 1) Masa Sidang I : 29 Mei s/d 1 Juni 1945
- 2) Masa Sidang II : 10 Juli s/d 17 Juli 1945

### Masa Sidang I (29 Mei s/d 1 Juni 1945)

- Bicara soal "Dasar Negara"
- 3 Tokoh Perumus Pancasila (Yamin-Soepomo-Soekarno)
- Untuk menampung rumusan Pancasila bersifat "perorangan/individu" dibentuk "Panitia Kecil" atau Panitia Sembilan".
- Ketua : Ir. Soekarno
  - ⇒ Tujuan dibentuknya Panitia 9 :
    - Untuk mencari "Modus" antara golongan Islam dengan golongan Kebangsaan mengenai soal "Agama dan Negara"
    - Golongan Agama - Dasar Negara Islam
      - Urusan agama disatukan dengan urusan Negara
    - Golongan Kebangsaan - Dasar Negara faham kebangsaan
      - Urusan agama dipisahkan dengan urusan negara
  - ⇒ Panitia 9 "berhasil mencapai Modus" yang diberi bentuk "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" atau "Piagam-Jakarta"
  - ⇒ Inti Modusnya : Rumusan Sila Pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

### Masa Sidang II (10 Juli s/d 17 Juli 1945)

- ⇒ Tanggal 11 Juli 1945 : Anggota Panitia 9 dijadikan "Panitian Perancang UUD"
  - Panitia ini kemudian membentuk "Panitian Kecil Perancang UUD"
  - Ketua : Soepomo
- ⇒ Tanggal 14 Juli 1945 : BPUPKI secara bulat menerima hasil karya Panitia 9 menjadi "Rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara Republik Indonesia".
- ⇒ Tanggal 16 Juli 1945 : BPUPKI menyetujui suatu "Rancangan Hukum Dasar Negara republik Indonesia" yang terdiri dari 3 bagian :
  - \* Bagian I : Pernyataan Indonesia Merdeka
  - \* Bagian II : Pembukaan, yang memuat Pancasila
  - \* Bagian III : Undang-Undang Dasar : pasal-pasal
- ⇒ Tanggal 17 Juli 1945 : Sidang Penutupan Resmi BPUPKI
- ⇒ Waktu Persidangan = 49 hari dengan hasil :
  1. Naskah Dasar Negara
  2. Naskah Undang-Undang Dasar Negara
- ⇒ Tinggal "menunggu" waktu Kemerdekaan



## 7. Tanggal 9 Agustus 1945

- ⇒ BPUPKI : dibubarkan
- ⇒ Dibentuk badan baru ⇒ PPKI
  - Ketua : Soekarno
  - Wakil Ketua : Hatta
- ⇒ Soekarno, Hatta, Dr. Radjiman W diundang Panglima tertinggi A>P. Jepang untuk menerima petunjuk tentang penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia di saigon-Vietnam.
- ⇒ 6 Agustus 1945 Hiroshima dan 9 Agustus 1945 Nagasaki di Bom oleh Amerika Serikat.

## 8. Tanggal 14 Agustus 1945

- ⇒ Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu
- ⇒ Akibat penyerahan :
  - Menurut Hukum Internasional, pihak yang kalah (Jepang) harus mempertahankan keadaan "Status Quo" pada saat ia menyerah ⇒ "Setiap perubahan keadaan politik maupun militer dilarang"
  - Hal ini berarti : Janji Jepang kepada Bangsa Indonesia untuk memberi kemerdekaan "tidak ada arti lagi"
  - Rencana Jepang memberi Kemerdekaan gagal.
- ⇒ "Ada korelasi" antara "kegagalan" Jepang untuk memberi kemerdekaan dengan "jiwa rancangan Pembukaan Hukum dasar" yang telah disetujui PPKI yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa" ..... "Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa ..... "

> Catatan penting : "Perjanjian Posdam" ?

## 9. Tanggal 17 Agustus 1945

(Jam 10.00 pagi, hari Jumat)

- ⇒ Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Kemerdekaan
- ⇒ Beberapa hal penting berhubungan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
  - 1) Adanya kekosongan kekuasaan pemerintahan antara tanggal 14 Agustus 1945 - 17 Agustus 1945
  - 2) Saat kapan Negara berdiri, dan syarat-syarat berdirinya, serta lahirnya tat hukum Indonesia (Arti Proklamasi)
  - 3) Peristiwa/kejadian penting tanggal 17 Agustus 1945 sore
  - 4) dan lain-lain.

> Catatan : 1. hal 60 - 63 (Suwarno)  
 2. hal 18 Dahlan T.  
 3. hal 19 - 20 Dahlan T.  
 hal 72 - 73 Suwarno

### Transformasi Pancasila

Pancasila  
Formal  
( 5 sila )

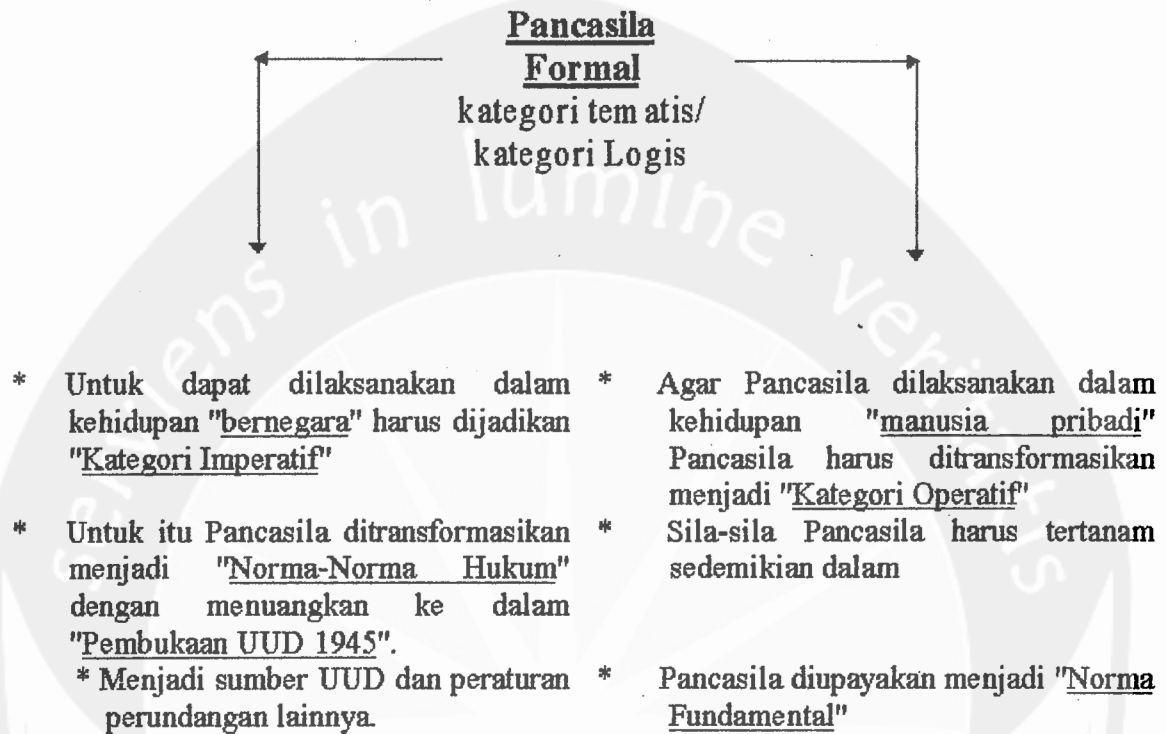


Rumusan Pancasila  
Umum  
kolektif/khusus  
individual  
ditransformasikan

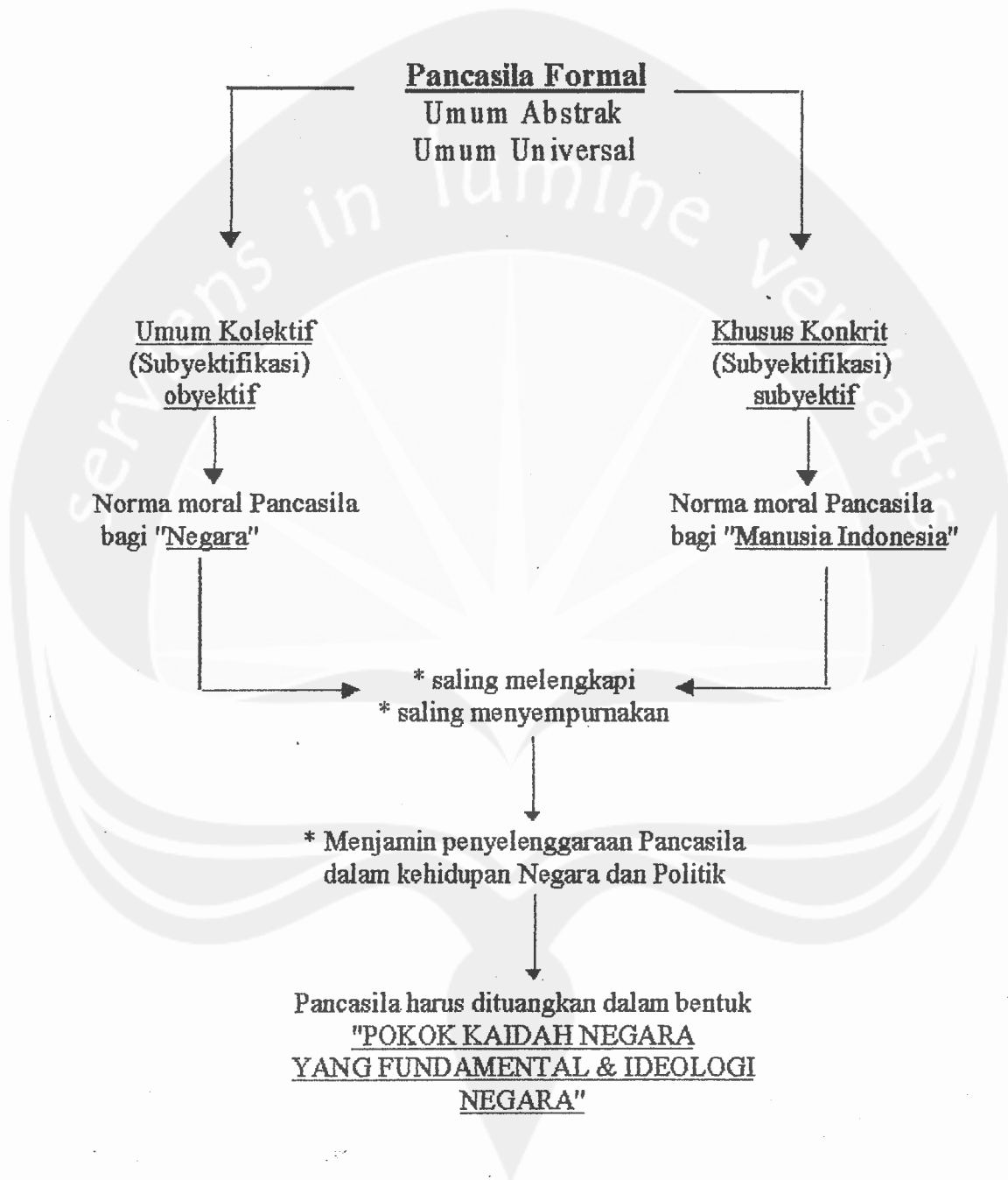
- Hukum  
Kenegaraan
- Ideologi Bangsa
- Moral Pribadi

- Abstrak - Umum - Universal
- Kognitif & teoritik
- Tidak dengan sendirinya dapat dilaksanakan dalam kehidupan praktis

## 1). Driyarkara



## 2) NOTONEGORO



**Subyektifikasi**  
**Obyektif**  
(Norm a Moral pancasila)  
bagi Negara



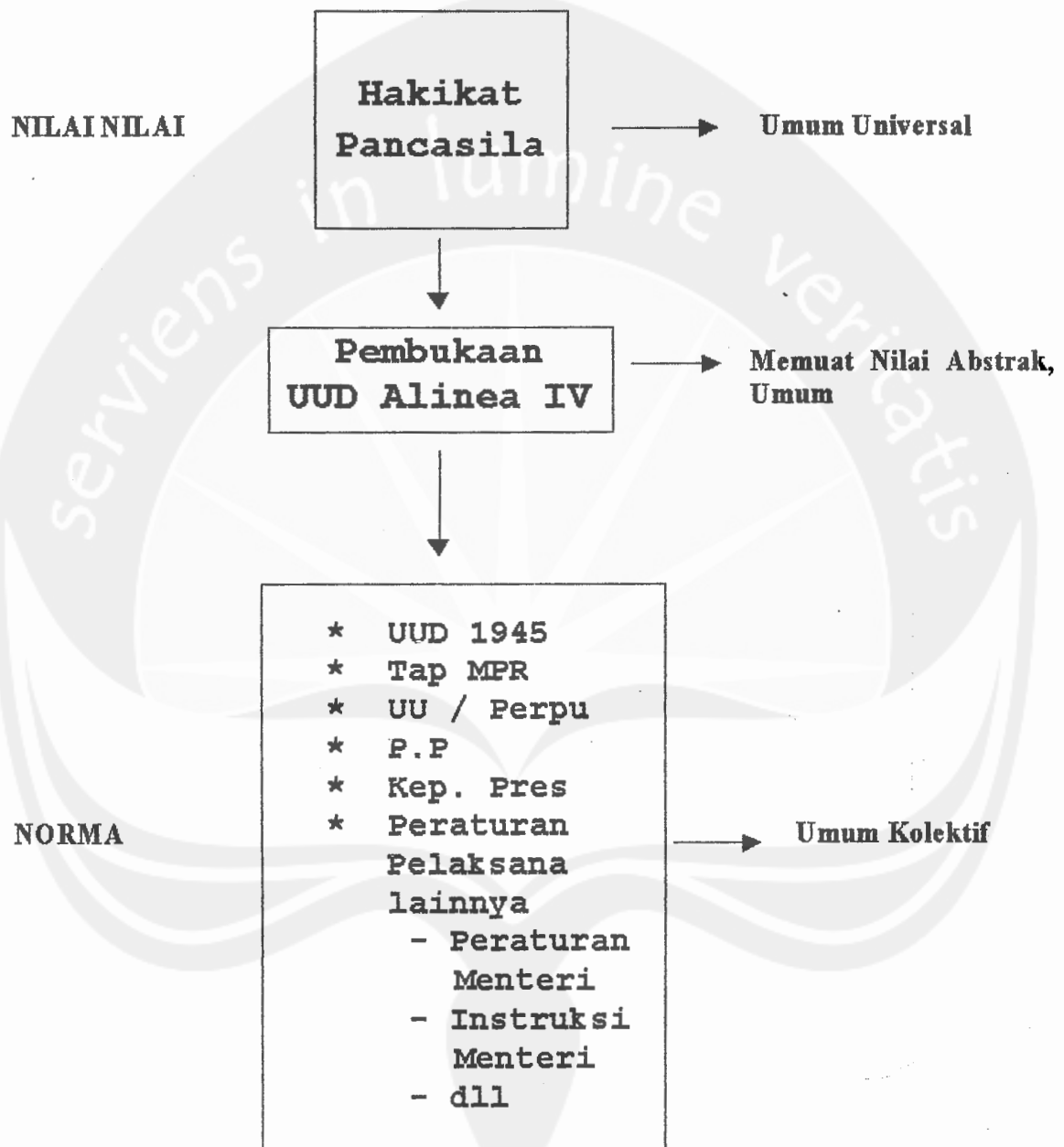
**PEMBUKAAN UUD 1945**

- Sumber tertib hukum
- Pokok kaidah Negara yang fundamental merupakan :
  - Pedoman Dasar
  - Sumber Perantara
  - Sumber Nilai
  - Hukum Positif

Oleh karena itu Pembukaan menjadi :

- Sumber Hakikat
- Bentuk &
- Sifat

Bagi hukum positif  
(d.h.i "UUD 1945")



## **B. Penjabaran Nilai Nilai Hak Asasi Manusi Berdasarkan Pancasila**

Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat itu, kemudian dijadikan sebagai landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, kajian nilai - nilai Pancasila dan transformasinya dalam Batang Tubuh UUD 1945 ini berarti bahwa, di dalam Pancasila terkandung prinsip-prinsip untuk hidup berbangsa dan bernegara (18 - 8 - 1945).

Notonagoro menyatakan : Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa kelima sila dalam Pancasila itu merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara dan berbangsa dalam masyarakat Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila itu hanya mempunyai satu pendukung yaitu manusia (Notonagoro, 1975 : 87).

Berpijak dari pernyataan pendapat di atas, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa kelima sila dalam Pancasila itu, berlaku bagi setiap manusia dari berbagai bangsa di dunia ini. Lebih lanjut dinyatakan bahwa : kodrat manusia itu adalah monopluralis, yaitu susunan kodrat yang terdiri atas tubuh dan jiwa, sifat kodrat yang terdiri dari perseorangan dan makhluk sosial, dan kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan (Notonagoro, 1975 : 87).

Berpijak dari pendapat itu pula, maka kelima sila dalam Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai kodrat manusia yang menyeluruh dan mengandung unsur-unsur nilai yang manusiawi.

Di atas telah dinyatakan oleh Notonagoro, bahwa pendukung Pancasila adalah Manusia, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila menghendaki agar manusia Indonesia dipandang sebagai manusia yang utuh atau manusia dalam totalitasnya.

Di dalam Negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai Falsafah Negara, maka manusia Indonesialah yang menjadi pusat pemahaman segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Berbicara mengenai Pancasila sebagai Dasar Penjabaran negara Indonesia, maka perlu dipahami terlebih dahulu mengenai hakikat manusia Indonesia sebagai pangkal tolaknya.

John Locke dan JJ Rousseau menyatakan bahwa, pada awalnya manusia bersifat bebas secara alamiah, dia memiliki potensi dan hak-hak yang bersifat dasar, yang telah dibawanya dalam eksistensinya sebagai manusia, kemudian karena dalam kenyataannya bahwa kehidupan secara alamiah terjadi perbenturan kepentingan, maka manusia memerlukan perlindungan bersama yang dibentuk oleh anggota kelompok masyarakat itu sendiri, yang dikenal dengan kontrak sosial. Disitulah muncul negara yang diharapkan dapat menjamin nilai -nilai, dalam kondisi demikianlah manusia menduduki posisi sentral/pokok dalam satu negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pdt Broto Sumedi, S.Th menyatakan : Sebagai langkah pertama di dalam pemikiran tentang hak-hak asasi manusia, kita menangkap martabat manusia sebagai pusat hak asasi manusia. Dengan kata lain untuk berfikir tentang hak asasi manusia, kita bertolak dari martabat manusia sebagai pusatnya. Begitu memang, sebab karena martabatnya sebagai manusialah maka manusia memiliki hak-hak yang kita sebut asasi (Sumedi, 1983 : 31).

Hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu memiliki unsur-unsur hakikat kemanusiaan (jamak) yang merupakan satu kesatuan. Manusia pada hakikatnya memiliki kodrat sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, sehingga bersifat otonom, oleh karena itu ia memiliki hak asasi serta kebebasan tanpa ada pengecualian. Di samping itu manusia juga sebagai makhluk Tuhan, ini berarti manusia memiliki hak untuk berdoa, menyembah Tuhannya.

Notonagoro menyatakan : “Sebagai makhluk yang wajar manusia memiliki susunan kodrat yaitu terdiri atas jiwa dan raga, jiwa terdiri dari akal, rasa, dan karsa” (Notonagoro, 1975 : 87).

Manusia sebagai makhluk yang wajar senantiasa ingin mencapai harkat dan martabatnya untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pengembangan akal manusia lewat pendidikan. Oleh karena itu memperoleh pendidikan/pengajaran merupakan hak asasi juga untuk mengembangkan intelektualitasnya, kreatifitas dan daya nalarnya, serta manusia mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Melalui akal, rasa dan karsa ini manusia ingin mewujudkan budaya dirinya, oleh karena itu manusia berhak untuk mencipta, menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Manusia sebagai makhluk jasmani, merupakan bagian dari alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, oleh karena itu manusia juga mempunyai unsur-unsur fisik/biologis, maka dari itu manusia memerlukan makanan yang cukup untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sehingga kesempatan bekerja, memperoleh penghidupan yang layak, kesehatan, memilih pasangan hidupnya juga merupakan hak asasi manusia.

Uraian di atas menunjukkan adanya suatu dasar penjabaran Hak-hak Asasi Manusia, yang dilandaskan pada sifat kemanusiaannya manusia, seperti telah diuraikan pula secara singkat pada bab terdahulu. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap negara mempunyai pandangan hidupnya sendiri-sendiri, mempunyai wilayahnya sendiri, mempunyai budayanya sendiri. Oleh karena itu, dengan sendirinya hak yang melekat pada diri manusia itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi setiap negara, walaupun tidak menutup kemungkinan ada hak-hak yang sama bagi setiap manusia di negara-negara manapun.

Berkaitan dengan hal tersebut Soehardjo Sastrosuehardjo menegaskan bahwa : Sudah barang tentu di kalangan masyarakat dunia ada sekian banyak pandangan atau persepsi tentang HAM. hal yang demikian itu tidaklah mengherankan, karena semua itu dipengaruhi oleh lingkungan dan situasi yang berbeda-beda. Masyarakat di negara-negara maju sudah pasti mempunyai pandangan yang berbeda dengan masyarakat di



negara-negara yang sedang berkembang. Pikiran dan kehendak manusia itu terikat pada situasi dimana ia hidup (Situationsgebundenheit des Menschlichen Denken und Willen). Atas dasar hal itu, maka sebelum kita mengambil sikap, kesemuanya itu harus kita telaah lebih dahulu dan dipertimbangkan. Yang perlu diperhatikan dan dihindarkan adalah pemaksaan terhadap suatu pendapat atau sikap tertentu (St. Harum Pudjiarto, RS : 1995 : iii).

Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo, menegaskan : "Pelaksanaan hak asasi manusia secara gamblang tidaklah mudah. Karena hakikat hak asasi manusia memiliki struktur sosialnya sendiri" (Suara Merdeka, 21 Desember 1992).

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa, pelaksanaan hak-hak asasi manusia dipengaruhi oleh struktur sosialnya. Demikian pula di Indonesia, kelima nilai dasar yang ada dalam Pancasila secara utuh dan bulat, merupakan kekhususan bagi Bangsa Indonesia, dan secara formal dan material diakui sebagai Falsafah Negara Indonesia. Dengan demikian maka Pancasila menjadi Landasan Moral Bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia serta Sumber dari segala Sumber Tertib Hukum, maka penjabaran hak asasi manusia Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila. Dengan kata lain penjabaran Hak-hak Asasi Manusia Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam kelima sila dalam Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Untuk lebih jelas memahami Pancasila sebagai dasar penjabaran hak asasi manusia di Indonesia, maka perlu pengkajian tiap-tiap sila, sehingga dapat dipahami bersama muatan-muatan hak asasi manusia dalam diri Pancasila itu.

Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa, Bangsa Indonesia mengakui adanya causa prima, ini berarti bahwa pada sila pertama itu mengandung unsur pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, sebagai awal dari sesuatu. Sebagai penyebab yang utama dan pertama, sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan kasih, keadilan, kesejahteraan hidup bersama serta persamaan.

Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini berarti pengabdian terhadap Tuhan dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran kasihnya dengan penuh keimanan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajarannya. Pendek kata Tuhan mengajarkan ketakwaan.

Pengabdian yang penuh dengan ketakwaan itu dapat terlaksana dengan baik, manakala penghormatan terhadap nilai manusia mendapat pengakuan berupa jaminan dari negara terhadap kemerdekaan beragama, menjalankan ajaran-ajaran/beribadat. Oleh karena itu kemerdekaan seseorang untuk memilih agama dan menjalankan ajarannya merupakan wujud jbaran nilai manusia dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menunjukkan kepada kita adanya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (*dignity of man*), hak-hak manusia (*human rights*) serta nilai-nilai kebebasan manusia (*human freedom*).

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai nilai-nilai yang sama, satu dengan yang lain, setiap manusia memilikinya. Oleh karena itu manusia harus diperlakukan sebagai manusia, tidak boleh dihina, disiksa, diperlakukan secara tidak pantas, diperbudak, dan lain sebagainya.

Nilai-nilai kemanusiaan juga berarti, bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dengan manusia-manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, pelaksanaan nilai manusia sebagai individu tidak boleh melanggar nilai manusia lain. Oleh karena hal itu perlu adanya keseimbangan, keselarasan antara nilai manusia sebagai individu dan nilai manusia sebagai warganegara (*hidup bersama*), dalam arti ada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Manusia sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, terikat oleh suatu nilai-nilai kebersamaan, oleh karena itu mempunyai hak-hak yang dapat dinikmati dan dipertahankan terhadap gangguan, hambatan, ancaman dari penguasa maupun individu-individu lainnya. Pengakuan nilai-nilai kemanusiaan ini, mengandung pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa, oleh karena itu nilai-nilai kemanusiaan ini menunjukkan kepada kita bangsa Indonesia yang anti kolonialisme dan imperialisme.

Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, suku, partai, golongan-golongan tertentu. Kepentingan bangsa di sini diartikan adanya keseimbangan yang harmonis, tidak mengabaikan kepentingan yang satu dengan mengutamakan kepentingan yang lain, tetapi mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama.

Nilai-nilai kesatuan ini lahir diwarnai dengan keinginan seluruh anggota masyarakat untuk menyatukan diri menjadi suatu bangsa yang besar dan beradab serta berketuhanan. Sudah barang tentu nilai-nilai kesatuan ini diharapkan tidak menjadi penyebab terlanggarnya nilai manusia anggota masyarakat. Oleh karena itu kesadaran akan nilai-nilai kesatuan muncul dalam bentuk penghargaan terhadap individu-individu serta bangsa-bangsa lain, hormat menghormati, anti imperialisme dengan tujuan untuk hidup rukun, berdampingan satu dengan yang lain.

Pada sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Pada sila keempat ini menunjukkan kepada kita adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat rakyat sebagai yang berdaulat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan negara ditangan rakyat, negara dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan melalui demokrasi perwakilan yang bagi negara Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi MPR itu sebenarnya

adalah penjelmaan dari kedaulatan rakyat. MPR membawa misi rakyat untuk hidup menegara, oleh karena itu MPR diberi kewenangan-kewenangan untuk mengatur negara, misalnya menetapkan Undang-Undang dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Kedaulatan rakyat ini menunjukkan kepada kita untuk ikut serta berperan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu perwujudan nilai pada sila ke empat ini antara lain hak untuk ikut serta dalam pemerintahan misalnya mengeluarkan pendapat, berkumpul, hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan-jabatan negara, untuk mendirikan partai, bela negara, kemerdekaan pers dan masih banyak lagi nilai dalam sila keempat ini.

Pada sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima ini menunjukkan kepada kita bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh setiap individu manusia sebagai anggota masyarakat. Keadilan menunjukkan adanya kesejahteraan hidup manusia. Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupannya yang layak dan terhormat sebagai manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak ada kesenjangan/kepincangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, tiap manusia harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat jaminan hidup yang layak, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya.

Mencermati hakikat keadilan tersebut di atas, maka wujud nilai manusia dalam sila kelima dapat berupa hidup layak, penjaminan hak milik, jaminan sosial, pekerjaan, upah yang layak, kesehatan, lingkungan yang bersih, pendidikan, perumahan dan masih banyak hak-hak yang lainnya. -

Dengan demikian sebenarnya tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah suatu masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur, materiil dan spirituil, jasmani rohani berdasar Pancasila dalam wadah negara Indonesia yang berdaulat, bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tertib damai dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka.

Keseluruhan uraian singkat di atas menunjukkan kita bahwa yang terpenting bagaimana kita bisa memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan, baik secara individu maupun hidup menegara.

Penjabaran butir-butir Hak Asasi manusia haruslah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, maupun kehidupan manusia dalam menegara, yakni aspek IPOLEKSOSBUD HANKAM, yang semuanya itu harus dijiwai dengan nilai-nilai luhur Pancasila seperti terurai di atas. beberapa aspek perwujudan hak asasi manusia sebagaimana diuraikan di bawah ini meliputi :

#### 1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

- Setiap orang bebas memilih Agama dan menjalankan Ajarannya
- Setiap orang bebas menyatakan pendapat lisan maupun tertulis
- Setiap orang bebas bergerak
- dan lain sebagainya

## 2. Hak Asasi Manusia dalam Bidang Politik (Political Rights)

- Setiap orang berhak mendirikan partai politik
- Setiap orang berhak menjadi anggota partai politik
- Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan
- Setiap orang berhak memilih dan dipilih dalam pemilu
- dan lain sebagainya

## 3. Hak Asasi dalam Bidang Ekonomi (Eeconomical Rights)

- Setiap orang berhak memperoleh nafkah
- Setiap orang berhak atas pekerjaan
- Setiap orang berhak atas penghasilan yang layak bagi kemanusiaan
- Setiap orang berhak atas jaminan keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan lingkungan kerja, keamanan serta ketenangan dalam suasana kerja
- Selama jam kerja setiap orang berhak menjalankan ibadah tanpa pemotongan upah
- Setiap orang berhak atas cuti tanpa pengurangan upah
- Setiap orang berhak atas jaminan hari tua, jaminan kesejahteraan dan jaminan sosial lainnya yang sah
- Semua lapangan kerja terbuka bagi setiap orang tanpa memandang perbedaan kelamin, asal, keturunan, agama, keyakinan, politik, warna kulit, status sosial dan lain sebagainya.

## 4. Hak Asasi dalam Bidang Pendidikan (Educational Rights)

- Setiap orang berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya
- Setiap orang berhak memilih jenis/jenjang pendidikan sesuai dengan prasyarat akademik yang berlaku
- Setiap orang bebas memilih tempat pendidikan tanpa memandang warna kulit, agama, kepercayaan/keyakinan, status sosial dan lain sebagainya
- Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam proses belajar dan mengajar
- Setiap orang bebas mendidik dan membuka lembaga pendidikan formal maupun nonformal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Setiap pendidik berhak atas jaminan keselamatan dan ketenangan dalam menjalankan profesinya
- Setiap pendidik berhak atas penghasilan yang sepadan dengan nilai pengabdianya
- Setiap pendidik berhak memberikan evaluasi terhadap anak didikannya tanpa pengaruh/campur tangan pihak lain
- Setiap penyelenggaraan pendidikan berhak memperoleh dana penunjang pendidikan dari siswa, orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan badan-badan lain yang tidak mengikat.

## 5. Hak Asasi Manusia dalam Bidang Kebudayaan (Cultural Rights)

- Setiap orang berhak mengembangkan/merekayasa ilmu dan teknologi secara bebas dan bertanggung jawab
- Setiap penciptaan ilmu, teknologi dan seni berhak atas pengakuan dan perlindungan oleh pemerintah atau badan-badan lainnya yang berwenang
- Setiap pencipta ilmu, teknologi dan seni berhak atas hak cipta dan atau hak paten atas hasil karyanya
- Setiap pemegang hak cipta berhak menyebarluaskan ciptaannya melalui media apapun
- Karya ilmu, teknologi, dan seni berfungsi sosial tanpa merugikan pihak pencipta
- Setiap orang berhak menggunakan karya ilmu, teknologi dan seni dalam batas-batas kewajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kebebasan memajukan/mengembangkan ilmu, teknologi dan seni diakui dan dilindungi oleh negara.

#### 6. Hak Asasi dalam Bidang Hukum (Legality Rights)

- Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan
- Tidak seorangpun boleh disiksa/dianiaya, diperlakukan tidak manusiawi
- Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan, diadili, tanpa melalui prosedur yang ditentukan
- Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan, melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang
- Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan diadili tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan berhak atas ganti kerugian yang sah
- Setiap orang yang sedang berperkara di pengadilan berhak atas peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak, serta biaya murah
- Setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- Setiap orang hanya dapat dihukum berdasar aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan
- Setiap terpidana berhak atas pembinaan dan perlakuan yang adil dan manusiawi
- Setiap terpidana berhak mendapat bimbingan jasmani maupun rohani sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya
- Setiap terpidana berhak atas grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi
- Setiap terpidana berhak atas kunjungan keluarga, penasehat hukum, maupun pembimbing rohani.

#### 7. Hak Asasi dalam Bidang Kemanusiaan (Humanity Rights)

- Tidak seorangpun boleh diperbudak
- Tidak seorangpun boleh dibebani pekerjaan melampaui batas kemampuannya
- Tidak seorangpun boleh diusir dari tempat tinggalnya
- Tidak seorangpun boleh diperlakukan sewenang-wenang
- Tidak seorangpun boleh memasuki tempat tinggal orang lain tanpa ijin
- Setiap orang berhak atas hak milik pribadi maupun milik bersama

- Pencabutan hak milik hanya dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Demi kepentingan umum hak milik seseorang dapat dimusnahkan
- Setiap orang berhak diperlakukan secara manusiawi
- Setiap bayi yang masih dalam kandungan berhak untuk hidup
- Setiap anak berhak perlakuan sebagaimana anak
- Setiap orang berhak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya selaras dengan martabatnya sebagai manusia.

#### 8. Hak Asasi Manusia dalam Bidang HANKAM (Defence and Security Rights)

- Setiap orang/warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara
- Setiap warganegara yang memnuhi syarat berhak dan wajib ikut serta dalam wajib militer dan militer sukarela
- Setiap orang berhak atas kehidupan yang aman, tertib dan tentram
- Setiap orang berhak meminta perlindungan kepada yang berwajib manakala dirinya dalam keadaan terancam
- Setiap orang berhak meminta suaka kepada negara manapun.

#### C. Kajian Nilai Nilai Pancasila dan Transformasinya dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945

Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa Pancasila formal sebagaimana tersebut di atas adalah kristalisasi nilai-nilai yang hidup, tumbuh berkembang, berurat berakar di bumi Indonesia yang diyakini kebenarannya. Dengan keyakinan akan kebenaran nilai-nilai tersebut, maka nilai-nilai Pancasila diangkat untuk dijadikan landasan dasar hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak universal itu harus diimplementasikan/dijabarkan/ ditransformasikan ke dalam bentuk norma dalam batang tubuhnya agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum hal itu dilakukan, peneliti sampaikan terlebih dahulu hakikat/makna masing-masing nilai-nilai Pancasila itu secara singkat sebagai berikut.

Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa, Bangsa Indonesia mengakui adanya *causa prima*, ini berarti bahwa pada sila pertama itu mengandung unsur pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, sebagai awal dari sesuatu. Sebagai penyebab yang utama dan pertama, sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan kasih, keadilan, kesejahteraan hidup bersama serta persamaan.

Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini berarti pengabdian terhadap Tuhan dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran kasihnya dengan penuh keimanan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajarannya. Pendek kata Tuhan mengajarkan ketakwaan.

Pengabdian yang penuh dengan ketakwaan itu dapat terlaksana dengan baik, manakala penghormatan terhadap nilai manusia mendapat pengakuan berupa jaminan dari negara terhadap kemerdekaan beragama, menjalankan ajaran-ajaran/beribadat. Oleh karena itu kemerdekaan seseorang untuk memilih agama dan menjalankan ajarannya merupakan wujud jabaran nilai manusia dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menunjukkan kepada kita adanya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (*dignity of man*), hak-hak manusia (*human rights*) serta nilai-nilai kebebasan manusia (*human freedom*).

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai nilai-nilai yang sama, satu dengan yang lain, setiap manusia memilikinya. Oleh karena itu manusia harus diperlakukan sebagai manusia, tidak boleh dihina, disiksa, diperlakukan secara tidak pantas, diperbudak, dan lain sebagainya.

Nilai-nilai kemanusiaan juga berarti, bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dengan manusia-manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, pelaksanaan nilai manusia sebagai individu tidak boleh melanggar nilai manusia lain. Oleh karena hal itu perlu adanya keseimbangan, keselarasan antara hak asasi manusia sebagai individu dan nilai manusia sebagai warganegara (hidup bersama), dalam arti ada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Manusia sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, terikat oleh suatu nilai-nilai kebersamaan, oleh karena itu mempunyai hak-hak yang dapat dinikmati dan dipertahankan terhadap gangguan, hambatan, ancaman dari penguasa maupun individu-individu lainnya. Pengakuan nilai-nilai kemanusiaan ini, mengandung pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa, oleh karena itu nilai-nilai kemanusiaan ini menunjukkan kepada kita bangsa Indonesia yang anti kolonialisme dan imperialisme.

Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, suku, partai, golongan-golongan tertentu. Kepentingan bangsa di sini diartikan adanya keseimbangan yang harmonis, tidak mengabaikan kepentingan yang satu dengan mengutamakan kepentingan yang lain, tetapi mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama.

Nilai-nilai kesatuan ini lahir diwarnai dengan keinginan seluruh anggota masyarakat untuk menyatukan diri menjadi suatu bangsa yang besar dan beradab serta berketuhanan. Sudah barang tentu nilai-nilai kesatuan ini diharapkan tidak menjadi penyebab terlanggarnya nilai manusia anggota masyarakat. Oleh karena itu kesadaran akan nilai-nilai kesatuan muncul dalam bentuk penghargaan terhadap individu-



individu serta bangsa-bangsa lain, hormat menghormati, anti imperialisme dengan tujuan untuk hidup rukun, berdampingan satu dengan yang lain.

Pada sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Pada sila keempat ini menunjukkan kepada kita adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat rakyat sebagai yang berdaulat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan negara ditangan rakyat, negara dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan melalui demokrasi perwakilan yang bagi negara Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi MPR itu sebenarnya adalah penjelmaan dari kedaulatan rakyat. MPR membawa misi rakyat untuk hidup menegara, oleh karena itu MPR diberi kewenangan-kewenangan untuk mengatur negara, misalnya menetapkan Undang-Undang dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Kedaulatan rakyat ini menunjukkan kepada kita untuk ikut serta berperan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu perwujudan nilai pada sila ke empat ini antara lain hak untuk ikut serta dalam pemerintahan misalnya mengeluarkan pendapat, berkumpul, untuk memilih dan dipilih dalam jabatan-jabatan negara, untuk mendirikan partai, bela negara, kemerdekaan pers dan masih banyak lagi nilai dalam sila keempat ini.

Pada sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima ini menunjukkan kepada kita bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh setiap individu manusia sebagai anggota masyarakat. Keadilan menunjukkan adanya kesejahteraan hidup manusia. Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupannya yang layak dan terhormat sebagai manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak ada kesenjangan/kepincangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, tiap manusia harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat jaminan hidup yang layak, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya.

Mencermati hakikat keadilan tersebut di atas, maka wujud nilai manusia dalam sila kelima dapat berupa hidup layak, penjaminan hak milik, jaminan sosial, pekerjaan, upah yang layak, kesehatan, lingkungan yang bersih, pendidikan, perumahan dan masih banyak hak-hak yang lainnya.

Dengan demikian sebenarnya tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah suatu masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur, materiil dan spirituil, jasmani rohani berdasar Pancasila dalam wadah negara Indonesia yang berdaulat, bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tertib damai dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka.

Keseluruhan uraian singkat di atas menunjukkan kita bahwa yang terpenting bagaimana kita bisa memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan, baik secara individu maupun hidup menegara.



Kelima nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat dalam arti tidak dapat dipisah-pisahkan. Sila pertama senantiasa menjiwai sila kedua, sila kedua menjiwai sila ketiga, sila ketiga menjiwai sila keempat, sila keempat menjiwai sila kelima dan sila kelima dijiwai oleh sila pertama. Demikian seterusnya yang pada akhirnya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana secara singkat telah diuraikan di atas, adalah nilai-nilai yang tumbuh di bumi Indonesia beribu-ribu tahun yang lalu, nilai-nilai itu diyakini kebenarannya dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia sebagai jiwa bangsa Indonesia sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keyakinan yang kuat terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila tersebut menggerakkan semangat bangsa Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan dasar hidup menegara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 nilai-nilai Pancasila diletakkan ke dalam wujud empat pokok pikiran, antara lain : Pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keempat Pokok pikiran tersebut merupakan nilai-nilai Pancasila yang oleh Driyarkara tersebut terdahulu dikatakan sebagai rumusan Pancasila formal yang masih dalam kategori tematis/kategoris logis, artinya masih bersifat abstrak, umum (universal) sehingga tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan praktis. Untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan praktis maka Pancasila (kategori tematis) tersebut harus diubah menjadi kategoris imperatif (dalam norma hukum), artinya nilai-nilai Pancasila diimplementasi dalam wujud norma hukum. Demikian juga oleh Notonagoro dikatakan, bahwa Pancasila formal merupakan nilai-nilai yang umum bersifat abstrak sehingga tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari maka pengertian yang umum bersifat abstrak itu harus ditransformasi ke dalam pengertian umum kolektif yang disebut dengan istilah subyektifikasi obyektif, artinya nilai-nilai Pancasila formal yang bersifat umum abstrak dan umum universal ditransformasi menjadi norma moral bagi negara. Oleh karena itu harus dituangkan ke dalam pokok kaidah negara yang fundamental dan ideologi negara.

Yang menjadi fokus perhatian sebelum nilai-nilai Pancasila formal ditransformasikan/implementasikan dalam undang-undang, maka terlebih dahulu nilai-nilai Pancasila formal itu ditransformasikan ke dalam batang tubuh UUD 1945. Secara detail transformasi nilai-nilai Pancasila formal dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai berikut :

- Pokok pikiran pertama Persatuan. Nilai persatuan ini ditransformasikan ke dalam Pasal 1 ayat (1); Pasal 26; Pasal 35; Pasal 36; pasal 31 ayat (2) dan pasal 32 UUD 1945.
- Pokok pikiran kedua Keadilan Sosial. Nilai Keadilan Sosial ini ditransformasikan ke dalam rumusan Pasal 27 ayat (1), (2); Pasal 28; Pasal 31 ayat (1); Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945.

- Pokok pikiran ketiga Kedaulatan Rakyat. Nilai kedaulatan rakyat ini ditransformasikan ke dalam rumusan Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; pasal 5 ayat (1); Pasal 6; Pasal 11; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 4 ayat (1); Pasal 7 dan Pasal 12 UUD 1945.
- Pokok pikiran keempat Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai Ketuhanan ini ditransformasikan ke dalam rumusan Pasal 9; Pasal 26 ayat (1); dan Pasal 29 ayat (1), (2) dan Pasal 34.

#### **D. Transformasi Nilai Nilai Pancasila dalam Beberapa Hukum Positif di Indonesia**

Seberapa jauh hak asasi manusia terwujud dalam hukum positif di Indonesia, hal ini tergantung apakah UUD 1945 sudah menjamin perlindungan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Pada uraian terdahulu penulis tegaskan bahwa hak asasi manusia adalah keseluruhan penjabaran dari hak dasar manusia yaitu hidup. Oleh karena hal itu maka segala sesuatu usaha untuk melangsungkan kehidupan manusia itu merupakan wujud hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis sajikan inventarisasi perwujudan Hak Asasi Manusia dalam beberapa hukum positif di Indonesia. Antara lain :

1. Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.14 Tahun 1970).
  - (a). Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka sebagaimana tersebut dalam rumusan pasal 1 ayat (I) di bawah ini :  
Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan adalah berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
  - (b). Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang, sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 5 ayat (1).
  - (c). Tak seorangpun dapat dihadapkan di pengadilan untuk diadili selain daripada ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 6 ayat (1).
  - (d). Tak seorangpun dapat dipidana tanpa keyakinan pengadilan bahwa orang tersebut bersalah, sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 6 ayat (2) di bawah ini :  
Tiada seorang juapun dapat dijatuhi hukum pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.
  - (e). Tak seorangpun dapat ditangkap, digeledah dan disita selain menurut undang-undang, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 di bawah ini :  
Tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan

kehakiman yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang.

- (f). Tiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 di bawah ini :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili, dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (g). Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 9 di bawah ini :

Seorang yang ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- (h). Setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 35.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946).

- a) Yang berkaitan dengan kehidupan, sebagaimana telah dirumuskan dalam :  
Pasal 338 - 340 mengenai pembunuhan pada umumnya,  
Pasal 341 - 343 mengenai pembunuhan bayi,  
Pasal 345 - 349 mengenai aborsi.
- b) Yang berkaitan dengan perampasan kemerdekaan, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 333 - 334.
- c) Yang berkaitan dengan perampasan, pengancaman, penculikan sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 335, 336 - 369, 328, 422.
- d) Yang berkaitan dengan badan seseorang, sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 351 - 355, 359 - 361.
- e) Yang berkaitan dengan kehormatan martabat manusia, sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 406 - 410.
- f) Yang terkait dengan kerusakan atau penghancuran barang milik seseorang, sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 406 - 410.

## 3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)

- a) Yang terkait dengan masalah penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 17, 19, 20, 21, 23, 24-29, 32-37, 38-46, 46-49.
- b) Hak yang terkait dengan hak tersangka dan terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam rumusan Pasal 50-68.
- c) Yang terkait dengan Bantuan Hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 69-74.
- d) Yang terkait dengan masalah Pra Peradilan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 77-83.
- e) Yang terkait dalam masalah pemeriksaan di muka pengadilan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 153 ayat (3) mengenai sidang terbuka untuk

umum; Pasal 158 mengenai asas praduga tidak bersalah; Pasal 195 mengenai pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum;

- f) Yang berkaitan dengan upaya hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 233-243 mengenai masalah banding; Pasal 244-258 mengenai masalah kasasi; Pasal 263-269 mengenai masalah kasasi demi kepentingan hukum; Pasal 263-269 mengenai peninjauan kembali;
- g) Yang terkait dengan Pelaksanaan Putusan Hakim, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 271 mengenai pelaksanaan pidana mati.

#### 4. Undang-Undang tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995)

- a) Yang berkaitan dengan masalah pembinaan yang didasarkan pada penghormatan harkat dan martabat manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 butir e.
- b) Yang berkaitan dengan masalah Hak Asasi Narapidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 tersebut di bawah ini :
  - Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
  - Mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani
  - Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
  - Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
  - Menyampaikan keluhan (akibat pelanggaran HAM sehubungan dengan pembinaan baik dilakukan oleh petugas maupun oleh sesama narapidana)
  - Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
  - Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
  - Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
  - Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi, grasi, abolisi, dan amnesti)
  - Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
  - Mendapatkan pembebasan bersyarat
  - Mendapatkan cuti menjelang bebas
  - Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak politik, hak memilih dan dipilih, dan hak perdata lainnya)

#### 5. Undang-Undang Kesehatan (UU No. 23 tahun 1992)

- a) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4
- b) Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53
- c) Hak Pasien untuk memperoleh informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua (second opinion), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) sebagai berikut : Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya

berkewajiban untuk mematuhi standart profesi dan menghormati hak pasien.

6. Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (UU No. 21 Tahun 1982)
  - a) Kebebasan Pers sesuai dengan Hak Asasi Warganegara dijamin, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1).
  - b) Setiap orang berhak mendirikan pers, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut: Bersama-sama orang lain, setiap warga negara mempunyai hak untuk mengusahakan penerbitan Pers dan mengelola badan usahanya berdasar asas kekeluargaan sesuai dengan hakikat demokrasi Pancasila.
7. Undang-Undang tentang Kewarganegaraan RI (UU No. 62 tahun 1958)  
 Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat hilang karena keinginannya sendiri, sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 17 sub a.
8. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)
  - a) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 45 ayat (4)
  - b) Anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) sebagai berikut: Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
  - c) Sidang anak tertutup untuk umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 57
  - d) Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain seperti mengenai pertumbuhan dan perkembangan baik fisik mental dan sosial anak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 60 ayat (2).
9. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979)
  - a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarga, maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1)
  - b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2)
  - c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (3)
  - d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan atau perkembangan yang wajar sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (4)

- e) Dalam keadaan yang membahayakan anak yang berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan lebih dahulu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3
- f) Anak yang tidak mempunyai orang tua, berhak memperoleh asuhan dari negara, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1)
- g) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang wajar, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1)
- h) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sebatas kemampuannya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7
- i) Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, politik, dan status sosial, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8.

10. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial (UU No. 6 Tahun 1974)

- a) Setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1
- b) Kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial, jaminan sosial, bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial, dan pengembangan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4.

11. Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Perumahan (UU No. 1 Tahun 1964) Menegaskan bahwa tiap warganegara berhak memperoleh dan menikmati perumahan yang layak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1

Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (UU No. 14 tahun 1969)

- a) Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3
- b) Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4
- c) Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral, kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9
- d) UU No. 3 Tahun 1961 yang menegaskan persetujuan terhadap Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional mengenai istirahat mingguan
- e) UU No. 80 Tahun 1957 mengenai persetujuan terhadap Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional terhadap pengupahan yang sama antara buruh laki-laki dan perempuan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3

**12. Undang-Undang tentang Hak Cipta (UU No. 12 Tahun 1997)**

- a) Perlindungan atas hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya : buku, program komputer, karya tulis yang diterbitkan; ceramah, kuliah, pidato dengan cara diucapkan; alat peraga yang dibuat untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan; ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara; drama tari, koreografi, pewayangan, pantomin; karya pertunjukan; karya siaran; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dari hasil pengalih wujudan. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11.
- b) Pemegang Hak Cipta berhak ganti kerugian atas pelanggaran hak cipta, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 42 ayat (1)



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia secara Dejure telah dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya. Sungguh demikian, masih banyak tuntutan sosial masyarakat yang belum ditransformasikan sebagai pengakuan hukum atas Hak asasi Manusia. Oleh karena itu perlu diupayakan secara sistematis baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap Hak asasi Manusia untuk mengadakan pengakuan terhadap aspek-aspek kemanusiaan yang belum dijangkau oleh hukum. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia secara De facto, masih perlu diperjuangkan dan disempurnakan.

#### B. Saran - saran.

1. Segera diadakan peninjauan kembali secara kritis terhadap perundang-undangan warisan kolonial maupun produk nasional yang melanggar Hak asasi Manusia dengan menggantikan hukum nasional yang penuh dengan muatan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan kecenderungan nilai-nilai Internasional.
2. Perlu segera diadakan pembaharuan hukum positif di Indonesia dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dengan pendekatan hukum diluar kodifikasi.
3. Perlu segera dilakukan pengkajian terhadap instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional.
4. Meyakini bahwa instrumen-instrumen Internasional sebagai sub sistem hukum nasional.
5. Mempercepat proses Ratifikasi terhadap nilai-nilai Internasional yang selaras serasi denga nilai-nilai Nasional.
6. Pembaharuan hukum (yang berkaitan dengan masalah) yang mendesak untuk diwujudkan dalam hukum positif di Indonesia antara lain :  
Apartheid, Crime Of Genocide, Terorism, Penghapusan Etnis tertentu.





## DAFTAR PUSTAKA

- Baker, Anton. Tahun tahun. *Hak Asasi Manusia Antara Liberalisme dan Sosialisme*. Journal Filsafat seri 2 edisi Mei. Fak. Filsafat UGM.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1977. *Tiga Undang-Undang Dasar*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bakry, Hasbullah. 1971. *Sistematika Filsafat*. Jakarta. PT. Wijaya.
- BP 7 Pusat. 1990. *Bahan Penataran UUD, P4, GBHN*. Jakarta.
- Berita Yudha. *Jaminan Hak Asasi Manusia Sudah Ada Sejak 1945*. Tajuk Rencana tanggal 28 Januari 1993.
- Djamal, D.. 1986. *Pokok Pokok Bahasan Pancasila*. Bandung. Remaja Karya.
- N. Driyarkara. 1989. *Filsafat Manusia*. Yogyakarta. Kanisius.
- Forum Keadilan No. 20 tanggal 21 Januari 1993.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Hamersma, Harry. 1992. *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius.
- Hardjowigoro, Marbangun. 1966. *Hak Hak Asasi Manusia Dalam Mekanisme Perintis Nasional, Regional, dan Internasional*. Bandung. Patma.
- Hatta, Mohhammad. 1979. *Alam Pikiran Yunani Jilid I-III*. Jakarta. Timun Mas.
- Hardono Hadi. Tanpa tahun. *Diklat Filsafat Manusia*. Yogyakarta. Fak. Teologi Wedabhakti, Kentungan Yogyakarta.
- Kansil, CST. 1979. *Pengantar Hukum Indonesia Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Kodhi, S. A. dan Soejadi, R. 1990. *Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
- K. Bertens. 1987. *Panorama Filsafat Modern*. Jakarta. Gramedia.
- Langeveld, MJ. 1961. *Menuju Ke Pemikiran Filsafat*. Jakarta. PT. Pembangunan.
- Leahy, Louis. 1984. *Manusia Sebuah Misteri*. Jakarta. Gramedia.

- Leenhouwers, P. 1988. *Manusia Dalam Lingkungannya (terjemahan)*. Jakarta. Gramedia.
- Naning, Randlom. 1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta. Lembaga Kriminologi UI.
- Notonagoro. 1984. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta. Pandjuran Tuju.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Hak Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*. Jakarta. Pradnyaparamita.
- Poepowardojo, Soerjanto. 1989. *Filsafat Pancasila (Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya)*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Reinhart, Anton. Tanpa tahun. *Masalah Hukum Dari Kratologi sampai Kwitansi*. Jakarta. Aksara Persada.
- Roesseau, JJ. 1986. *Kontak Sosial. Alih Bahasa : Sumardjo*. Jakarta. Erlangga.
- Sastrosoehardjo, Soehardjo. *Konsep Tentang hak Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pertumbuhan Masyarakat, Bangsa dan Negara RI*. Makalah Seminar Nasional, 25 Februari 1993. Semarang. Fakultas Hukum UNDIP.
- ....., *Wawasan HAM dalam Kerangka UUD 1945*. Harian Suara Merdeka, tanggal 11 Februari 1993.
- Sunoto. 1992. *Mengenal Filsafat Pancasila I*. Yogyakarta. Prasetya Widya Pratama.
- Suseno, Magnis. F. 1991. *Berfilsafat Dari Konteks*. Jakarta. Pustaka Utama.
- Suara Merdeka. 1992. *Masalah Hak Asasi Manusia*, tanggal 21 Desember 1992.
- ....., 1993. *Perwujudan HAM Sebuah Proses Evolusi*, tanggal 27 Januari 1993.
- ....., *Tahun 1993 Sebagai Tahun Hak Asasi Manusia*, tanggal 2 Januari 1993.
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Filsafat Umum*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Wiyotenoyo, Broto Sumedi. Tanpa tahun. *Manusia Dan Hak Asasi Manusia*. Semarang. Satya Wacana.
- Wollhoof. 1960. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*. Jakarta. Timun Mas.
- H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1995.

Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Moh. Busyro Muqquodas dkk, Politik Pembangunan Hukum Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 1992.

O. Noto Hamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1968.

Padmo Wahyono dkk, Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transition : Toward Responsive Law, Harper & Row, New York, 1978.

Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, CV. Rajawali, Jakarta, 1989

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981

-----, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.



PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ATMA JAYA  
YOGYAKARTA